



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN  
(LKPPJ)  
TAHUN 2019**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkenaanNyalah seluruh rangkaian program kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2019 dapat terlaksanakan dengan baik, walaupun mengalami beberapa hambatan proses pelaksanaannya, serta menjadi dasar daripada Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (LKPJ-BKBP Prov.Sulbar) untuk periode Tahun Anggaran 2019.

Dimana Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (LKPJ-BKBP Prov.Sulbar) ini bertujuan sebagai media informasi tentang pelaksanaan mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tidak terlepas daripada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (LKPJ-BKBP Prov.Sulbar) ini berisikan identifikasi dan indikator-indikator perencanaan kinerja yang berkuantitatif dan berkualitas di segala bidang serta tidak terlepas daripada visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, tetapi tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu saran dan perbaikan Kami harapkan guna lebih menyempurnakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (LKPJ-BKBP Prov.Sulbar) ini sebagai bahan acuan, dan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya guna meningkatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Mamuju, 27 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Sulawesi Barat

**Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19640408 198603 1 023

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>1</b>
<b>A. BELANJA RUTIN.....</b>	<b>1</b>
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	1
II. Program Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur.....	12
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.....	18
IV. Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur.....	19
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.....	29
<b>B. URUSAN WAJIB.....</b>	<b>41</b>
VI. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.....	41
VII. Program Pendidikan Politik Masyarakat.....	51
VIII. Program Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.....	53
IX. Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.....	56
X. Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri.....	58
XI. Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.....	65
XII. Program Pembinaan Karakter Bangsa.....	71
<b>BAB VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>73</b>
A. Kerjasama Antar Daerah.....	73
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.....	73
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	73
D. Pembinaan Batas Wilayah.....	73
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (BPBD).....	73
F. Pengelolaan Kawasan Khusus.....	73
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (KESBANGPOL dan SATPOL PP)..	74
1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya).	74
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum...	74

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan.....	75
4. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	76
5. Penanggulangan dan Kendalanya.....	76
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.....	77

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I. Latar Belakang.....	1
II. Landasan Hukum.....	3
III. Maksud dan Tujuan.....	4
IV. Visi dan Misi.....	5
<b>BAB II. PENJABARAN APBD.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III. HASIL PENYELENGGARAN UMUM PEMERINTAHAN.....</b>	<b>11</b>
A. Kerjasama Antar Daerah.....	11
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....	11
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.....	11
D. Pembinaan Batas Wilayah.....	11
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana (BPBD).....	11
F. Pengelolaan Kawasan Khusus.....	12
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kesbangpol dan Satpol PP).....	12
1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya).....	12
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum).....	12
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan.....	13
4. Sumber dan Jumlah Anggaran.....	15
5. Penanggulangan dan Kendalanya.....	16
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.....	16
<b>BAB IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN..</b>	<b>18</b>
A. Belanja Rutin.....	18
B. Urusan Wajib.....	106
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Rekomendasi.....	108



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Latar Belakang**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6), pada Bab VII diatur pada Ketentuan Peralihan Pasal 9 menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013 yaitu membantu Gubernur dalam menjaga

keamanan dan kenyamanan lingkungan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri 11 tahun 2019, merupakan Penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja. Maka dari itu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol yang masih berbentuk kantor menjadi badan dengan berlandaskan Pasal 20 Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengacu pada peraturan pelaksana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Maka dari itu, Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara yang diwajibkan untuk menetapkan hasil evaluasi



pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dicapai selama setahun dan menyampaikannya dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).LKPJ merupakan mengimplementasikan keterangan pencapaian pertanggungjawaban.Penyusunan LKPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah melalui Kepala Badan.

## II. Dasar Hukum

Landasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun

- 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.

### **III. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan LKPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publikatas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

#### **b. Tujuan**

Penyusunan LKPJ adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKPJ ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sulawesi Barat.

#### IV. Visi dan Misi

##### ❖ Visi

Sebagai unit operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta yang ditetapkan Gubernur sesuai dengan Draft Rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Sejalan dengan perkembangan pertumbuhan penduduk, keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil terhadap Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang dan penggunaan teknologi begitu cepat di era reformasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mampu, dan mau berperan aktif lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien serta mendukung penciptaan stabilitas politik serta pemerintahan dalam Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam menjawab tantangan dimaksud, diperlukan adanya kesadaran diri dan kemauan yang kuat untuk mengubah diri dalam perilaku, manusia yang kurang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan kebangsaan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

yang jelas, dan dapat menjadi landasan operasional organisasi serta mendukung kebijakan nasional dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah :

**“Terwujudnya Stabilitas Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Dinamika Nilai-Nilai Sosial Budaya serta Etika Politik yang Maju dan Malaqbiq”**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja unit selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun dalam penentuan Visi perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut :

- Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ;
- Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ;
- Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami ;
- Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat ; dan
- Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian.

❖ Misi

Berdasarkan tupoksi SKPD yang ada pada bagian 2.1. maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung pelaksanaan misi ke satu (1) dan ke dua (2) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

**“(1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya ; dan (2) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya”**

Organisasi yang dibentuk selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, guna mempertahankan keberadaannya ditetapkan Misi yang merupakan pernyataan tentang tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai organisasi yang bersangkutan. Misi yang ditetapkan ini menjadi tuntutan bagi manajemen dalam menjalankan roda organisasinya.

Penetapan Misi merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan guna mengarahkan kegiatan operasional organisasi menuju sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui strategis yang telah dipilih.

Mengacu pada Visi yang ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran organisasi yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen.

Pernyataan Misi organisais tersebut mengandung makna :

- ❖ Pernyataan tentang aktivitas organisasi yang ingin dicapai ;
- ❖ Citra organisasi yang diinginkan diwujudkan agar dikenal oleh berbagai pihak;

❖ Pandangan organisasi tentang keberadaan profesinya sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah merumuskan Misi Organisasi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan paham akan pentingnya nilai-nilai sosial budaya dan etika politik.**
- 2. Meningkatkan etika politik yang stabil pada ORMAS dan organisasi lainnya yang berkualitas.**
- 3. Menciptakan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dengan budaya yang berbeda-beda.**
- 4. Meningkatkan stabilitas politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.**
- 5. Meningkatkan fasilitas dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.**
- 6. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 4 Pilar Kebangsaan (UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun dalam penentuan Misi perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut :

- Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beberapa periode tertentu ;
- Misi harus dapat menggambarkan penjabarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di atasnya serta tugas-tugas yang dibebankan oleh Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;

- Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi operasional.

**BAB II**  
**PENJABARAN APBD**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2019 didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat yang diterima dan direalisasikan adalah sebagai berikut :

APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebelum perubahan dengan total pagu anggaran belanja sebesar Rp.8.892.101.759,92,- yang terdiri dari pagu Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.4.090.101.759,92,- dan pagu Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 4.802.000.000,00,- mengalami rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 298.470.364,66,- (3,36%) dari total pagu belanja. Sehingga pada akhir tahun anggaran APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berubah pada total pagu anggaran belanja sebesar Rp. 8.593.631.395,26,- yang terdiri dari pagu Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.3.725.151.035,00,- dengan Realisasi sebesar Rp.3.655.333.213,00,- (98,13%) dan sisa pagu anggaran sebesar Rp.69.817.782,00,-. Dan untuk pagu Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.4.868.480.360,26,- dengan Realisasi sebesar Rp.4.649.968.603,00,- (95,51%) dan sisa pagu anggaran sebesar Rp.218.511.757,00,-.



### **BAB III**

#### **HASIL PENYELENGGARAAN UMUM PEMERINTAHAN**

##### **A. Kerjasama Antar Daerah**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

##### **B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

##### **C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

##### **D. Pembinaan Batas Wilayah**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

##### **E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana (BPBD)**

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Potensi Bencana Yang Diperkiraan Terjadi

#### **F. Pengelolaan Kawasan Khusus**

1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
2. Sumber Anggaran
3. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi.

#### **G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KESBANGPOL dan SATPOL PP).**

##### **1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya).**

Penanganan konflik sosial yang dilakukan selama ini masih bersifat parsial dan belum komprehensif, sehingga mengakibatkan munculnya komplek berupa tindakan yang eksekutif terhadap pelaku, dugaan pelanggaran HAM, dan bahkan ada penilaian ragu-ragu, tidak mampu, serta seolah-olah ada kesan terjadi pembiaran.

##### **2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

- Kabinda Provinsi Sulawesi Barat.
- Kakesbang Pol se- Sulawesi Barat.
- Kapolres se- Sulawesi Barat.
- Pasi Intel Kodim se-Sulawesi Barat.
- Kasat Intel Polres se-Sulawesi Barat.
- Anggota Bais TNI.
- Ketua KPU dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Anggota Kominda Provinsi Sulawesi Barat.

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
- Kasatpol Satpol PP se-Sulawesi Barat.
- Kavid. Keimigrasian Provinsi Sulawesi Barat.
- Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.
- Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
- Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Barat.
- Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat.
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- FKUB Provinsi Sulawesi Barat.
- FKDM Provinsi Sulawesi Barat.
- Danpos Al.
- Kapolsek Tommo.
- Kapolsek Budong – Budong.
- Kapolsek Pangale.
- Kapolsek Mamuju.
- Posda BIN Kab.Mamasa, Polman, & Majene.
- Kasiei Intel Kab. Mamasa, Polman & Majene.
- Pasie OPS Dandim Kab. Mamasa, Polman & Majene.
- Pasie Intel Dandim Kab. Mamasa, Polman & Majene.

### **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan.**

➤ Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Menurut Tingkat Pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SMA	6	
2.	SARJANA MUDA	4	
3.	STRATA 1 (S.1)	20	
4.	STRATA 2 (S.2)	8	
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	

➤ Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Tingkat Golongan :

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	5	
2.	III	27	
3.	II	6	
4.	I	0	
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	

➤ Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Eselon & Struktur Organisasi :

- a. Eselon II = 1 Orang
- b. Eselon III = 3 Orang
- c. Eselon IV = 8 Orang
- d. Staf = 26 Orang

**Jumlah 38 Orang**

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenjang Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Struktural :

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim Tk.I	0	
2.	Diklatpim Tk.II	1	
3.	Diklatpim Tk.III	6	
4.	Diklatpim Tk.IV	5	
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenis Kelamin :

1. Laki-Laki : 26 Orang
2. Perempuan : 12 Orang

Jumlah : 38

#### 4. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendapat alokasi anggaran dari dana APBD Provinsi Sulawesi Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp.4.802.000.000,-** telah perubahan sebesar **Rp.4.868.480.360,-** yang terealisasi sebesar **Rp.4.649.968.603,-** atau **95,51%.**

**5. Penanggulangan dan Kendalanya.**

- Dibentuknya koordinasi Forum Dialog Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
- Terbentuknya rapat koordinasi gangguan keamanan dalam negeri (Sosialisasi Sistem Pencegahan Dini Implementasi Inpres No. 2 tahun 2013 Junto Inpres No 1 Tahun tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
- Terbentuknya rapat koordinasi dan evaluasi Pencegahan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2019.

**6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.**

- Adanya kesepakatan dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Polman dan Majene terkait penyusunan rencana aksi terpadu TA.2019.
- Menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta instansi dan unsur terkait lainnya beserta jajarannya dalam upaya terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif aman dan damai.
- Terwujudnya ketertiban dan kemandirian dengan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak dengan menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi konflik, gejala atau dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini

- Terbangunnya deteksi dini dan mengatasi potensi bencana baik bencana alam, serta meningkatkan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa dan mencegah timbulnya konflik sosial dan sebagainya.

**BAB IV.**

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN  
TUGAS PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN**

SKPD : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Belanja Langsung : **Rp. 4.868.480.360.26,-**

Realisasi Keuangan BL : **Rp. 4.649.968.603.00,- (95,51%)**

Realisasi Fisik (%) : **100%**

Sisa Pagu Anggaran : **Rp. 288.329.539.26,-**

**A. Belanja Rutin**

I. Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

1. Kegiatan : **Penyediaan Jasa Surat Menyurat.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan tentang pengiriman jasa persuratan yang dilakukan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Kantor Pos maupun melalui Biro / Jasa Pengiriman Surat / Barang Lainnya, serta penyediaan materai dan pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 35orang.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas mutu administrasi kantor lewat media surat menyurat.</li> <li>- Tujuan : Adanya 11.110Surat Masuk dan Keluar.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya data-data pengiriman surat administrasi kantor yang akurat.	Surat, Materai dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT).
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan.	Tempat: Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya,	- Belanja Materai 6000 dan 3000	- Kantor Pos dan Giro - Kantor Badan Kesatuan Bangsa



	Peralatan / Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci).		dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.420.390.000,- APBD	Rp408.390.000,- (97,15%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah materai 6000 & 3000 yang terbelikan dan Jumlah gaji PTT yang terbayarkan selama 12 Bulan.	Jumlah materai 6000 & 3000 yang terbelikan dan Jumlah gaji PTT yang terbayarkan selama 12 Bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	Lebih ditingkatkannya kualitas proses pengiriman surat menyuratnya.	

I. Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan rutin untuk pemenuhan kebutuhan akan sumber daya air dan listrik dalam upaya mendukung proses kerja sehingga dapat menunjang kelancaran administrasi kantor dengan selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu administrasi kantor lewat media via telepon dan via email. Tujuan : Adanya jaringan telepon, fax dan via email.	
3.	Sasaran	Terjalannya kelancaran hubungan komunikasi dengan baik.	Pelayanan telepon, fax dan via email kantor selama setahun.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2019.	Tempat: Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Materai	PT. Telkom Cabang Mamuju.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.14.028.000,- APBD	Rp.12.273.428,-(87,49%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah pembayaran jasa telpon, air dan listrik selama 12 Bulan.	Jumlah pembayaran jasa telpon, air dan listrik selama 12 Bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih ditingkatkannya hubungan komunikasi antar instansi terkait</li> <li>- Alokasi anggarannya berlebihan.</li> </ul>	

I. Program : **Program Pelayanan Administasi Perkantoran.**

3. Kegiatan : **Penyediaan Alat Tulis Kantor.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor merupakan kegiatan rutin yang sangat menunjang kelancaran administrasi kantor dengan baik selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas mutu alat tulis kantor dan menjamin kelancaran administrasi kantor.</li> <li>- Adanya alat tulis kantor.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya kebutuhan alat tulis kantor dengan baik.	21 Macam alat tulis kantor.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol.Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol.Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan ( Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK berupa Amplop Ero,Amplop Kijang, Kertas Folio,Kertas Kwarto, Ncr, Tinta, Map, Penjepit Hekter, Peluru Hekter, Catridge, Buku Agenda, Ballpoint</li> </ul>	Noor Berkah
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.44.495.500,- APBD	Rp.43.836.900,- (98.52%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 22 jenis alat tulis kantor yang terpakai selama 12 Bulan.	Jumlah 22 jenis alat tulis kantor yang terpakai selama 12 Bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran/Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih melengkapi dan menambah alat tulis kantor demi kelancaran pekerjaan.</li> <li>- Perlunya mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk urusan kelengkapan alat tulis kantor.</li> </ul>	

I. Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

4. Kegiatan : **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran administrasi kantor selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas mutu barang-barang yang dicetak dan penggandaan.</li> <li>- Adanya barang-barang yang dicetak dan penggandaan dikantor.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya barang - barang cetakan dan penggandaan.	Cetak SPPD lembar depan, SPPD lembar belakang, blangko serta fotocopy.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Bahan cetak spanduk dan baliho serta fotocopy.	Noor Berkah
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.34.692.000,- APBD	Rp.34.672.600,- (99,94%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah lembar depan dan belakang SPPD serta Jumlah SPM yang tercetak selama 12 Bulan.	Jumlah lembar depan dan belakang SPPD serta Jumlah SPM yang tercetak selama 12 Bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran/Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih melengkapi dan menambah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan demi kelancaran pekerjaan.</li> <li>- Perlunya mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk urusan kelengkapan barang cetakan dan penggandaan.</li> </ul>	

I. Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

5. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran administrasi kantor selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas mutu administrasi kantor lewat media bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.</li> <li>- Adanya administrasi kantor lewat media bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya beberapa bahan bacaan dan beberapa peraturan perundang-undangan.	Surat kabar / majalah dan Iklan Pemerintah / Ucapan selamat.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatannya / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	Belanja jasa kantor berupa Advetorial	Adanya Advetorial
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.24.000.000,- APBD	Rp.24.000.000,- (100%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 10 kali bahan bacaan, majalah koran dan ucapan selamat yang terbayarkan selama 12 Bulan.	Jumlah 10 kali bahan bacaan, majalah koran dan ucapan selamat yang terbayarkan selama 12 Bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya memperhatikan pengalokasikan penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

I. Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

6. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini hanya diperuntukkan untuk belanja makan dan minum rapat dan tamu selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan dan menjamin pemenuhan kebutuhan akan makan dan minum rapat dan tamu.</li> <li>- Adanya pemenuhan kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Terpenuhinya kebutuhan akan makan dan minum pegawai dengan baik selama 1 tahun.	1.272 Kotak Makan minum rapat dan tamu kantor.
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/ d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu.	Kios Dani Mamuju.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.35.400.000,- APBD	Rp.35.390.000,- (99,97%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 1.227 kotak makan dan minum rapat, tamu serta pegawai selama 12 Bulan.	Jumlah 1.227 kotak makan dan minum rapat, tamu serta pegawai selama 12 Bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya memperhatikan pengalokasikan penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

7. Kegiatan :Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi kegiatan kantor khususnya dalam hal koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait yang ada di pusat dan di provinsi selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menciptakan kelancaran oleh karena adanya koordinasi dan konsultasi di beberapa instansi terkait yang ada di Provinsi dan sekitarnya.</li> <li>- Adanya koordinasi dan konsultasi di beberapa instansi terkait yang ada di Provinsi dan sekitarnya.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya laporan hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan instansi yang lainnya.	Adanya SPPD dan Laporan perjalanan dinas di Provinsi dan sekitarnya.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Kertas NCR dan ATK</li> </ul>	Kunjungan kerja ke Makassar dan Jakarta.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.240.000.000,- APBD	Rp.239.766.369,- (99,90%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 32 kali SPPD dan laporan perjalanan dinas Luar Daerah selama setahun.	Jumlah 32 kali SPPD dan laporan perjalanan dinas Luar Daerah selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	

9.	Saran / Tindaklanjut	- Perlunya digunakan dengan baik anggaran perjalanan dinas ke luar daerah yang diberikan.
----	----------------------	---



I. Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

8. Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi kantor khususnya dalam hal koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait yang ada di 6 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menciptakan kelancaran oleh karena adanya koordinasi dan konsultasi di beberapa instansi terkait yang ada di Kabupaten / Kota dan sekitarnya.</li> <li>- Adanya koordinasi dan konsultasi di beberapa instansi terkait yang ada di Kabupaten / Kota dan sekitarnya.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya laporan hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan instansi yang lainnya.	Adanya SPPD dan Laporan perjalanan dinas di beberapa Kabupaten / Kota dan sekitarnya.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Beberapa instansi yang ada di 6 kabupaten. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat: Beberapa instansi yang ada di 6 kabupaten. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli).	- Belanja Kertas NCR dan ATK	Kunjungan kerja ke beberapa kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, Mamuju Tengah, Majene, Mamasa dan Polman.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.311.700.341,- APBD	Rp.311.315.500,- (99,88%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 68 kali SPPD dan laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah di 5 Kabupaten selama setahun.	Jumlah 68 kali SPPD dan laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah di 5 Kabupaten selama setahun.

8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.
9.	Saran / Tindaklanjut	- Perlunya digunakan dengan baik anggaran perjalanan dinas ke dalam daerah yang diberikan.

II. Program : **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

1. Kegiatan : **Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang khusus diadakan untuk kelengkapan peralatan gedung kantor.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana peralatan gedung kantor.</li> <li>- Adanya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya barang berupa Printer, Lemari Arsip Sliding Door dan CCTV	Adanya barang berupa Lemari Arsip Sliding Door dan CCTV
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 23 April s/d 20 Mei 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 23 April s/d 20 Mei 2019
5.	Keperluan Bahan ( Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Honor Tim PNS Pengadaan, Penerima dan Pemeriksa</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Fotocopy dan Jilid</li> </ul>	Toko Devin Elektronik
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.48.425.000,- APBD	Rp.45.305.000,- (93,56%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 4 jenis pengadaan peralatan gedung kantor berupa Printer, Lemari Arsip Sliding Door, dan CCTV dalam setahun.	Jumlah 4 jenis pengadaan peralatan gedung kantor berupa Printer, Lemari Arsip Sliding Door, dan CCTV dalam setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya digunakan dengan alokasi anggaran pengadaan pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

II. Program : **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

2. Kegiatan : **Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaraan aktivitas Kepala Badan dalam hal pemeliharaan rutin mobil jabatan.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas mutu pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan demi kelancaran aktivitas Kepala Badan.</li> <li>- Adanya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan demi kelancaran aktivitas Kepala Badan.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya pemeliharaan- pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan.	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan sebanyak 1 unit.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol.  Tanggal : Januari s/d Desember 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol.  Tanggal : Januari s/d Desember 2019
5.	Keperluan Bahan ( Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Jasa Kantor (Gaji Sopir)</li> <li>- Belanja Jasa Servis</li> <li>- Belanja Jasa Penggantian Suku Cadang.</li> <li>- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Oli serta STNK.</li> </ul>	Bekerjasama dengan beberapa bengkel yang ada di Mamuju.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.72.100.000,- APBD	Rp.64.472.000,- (89,42%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah pemeliharaan BBM, Suku Cadang dan STNK Mobil serta Gaji Sopir Eselon II selama 12 bulan.	Jumlah pemeliharaan BBM, Suku Cadang dan STNK Mobil serta Gaji Sopir Eselon II selama 12 bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya digunakan dengan alokasi anggaran pengadaan pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

II. Program : **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran pelayanan aparatur.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas mutu pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional untuk mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.</li> <li>- Adanya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua yaitu pembelian bahan bakar kendaraan roda empat dan roda dua, penggantian oli mesin kendaraan roda empat dan roda dua, servis kendaraan roda empat dan roda dua, pembiayaan pajak kendaraan, dan penggantian suku cadang kendaraan roda empat dan roda dua.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional untuk 3 unit mobil 18 unit motor dan 18 unit penggantian STNK.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Penggantian Suku Cadang untuk 18 Unit Roda Dua dan 3 Unit Roda Empat.</li> <li>- Belanja Bakar Minyak, Gas dan Oli untuk 18 Unit Roda Dua dan 3 Unit Roda Empat.</li> <li>- Belanja STNK untuk 18 Unit Roda Dua dan 3 Unit Roda Empat.</li> </ul>	Depot Pertamina Mamuju untuk pembelian BBM dan beberapa bengkel untuk pengadaan suku cadang dan pemeliharaan suku cadang.

6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.134.500.000,- APBD	Rp.104.073.650,- (77,38%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah pemeliharaan 18 unit motor dan 3 unit mobil operasional selama 12 bulan.	Jumlah pemeliharaan 18 unit motor dan 3 unit mobil operasional selama 12 bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak lanjut	- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.	

II. Program : **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

4. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran pelayanan aparatur dalam hal peralatan kantor.	
2.	Maksud dan Tujuan	Diadakan untuk pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor dengan tujuan demi peralatan kantor dalam keadaan baik dan demi kelancaran aktivitas dikantor.	
3.	Sasaran	Service peralatan dan perlengkapan kantor.	Servis komputer, servis notebook, servis printer, servis AC
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019
5.	Keperluan Bahan ( Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci)	- Belanja Materai - Belanja Jasa Servis Komputer, Notebook, Printer dan AC	Cahaya Komputer; Ganjil Komputer & Starcom
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.24.000.000,- APBD	Rp.23.660.000,- (98,58%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan.	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.	

III. Program : **Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

1. Kegiatan : **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya khusus diadakan untuk kelancaran aktivitas dan keseragaman pegawai.	
2.	Maksud dan Tujuan	Diadakan untuk pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk keseragaman pegawai dan untuk menunjang aktivitas pegawai.	
3.	Sasaran	Adanya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa Pakaian Olah Raga 77Stel dan Baju Sutera Mandar 77 Stel	Adanya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa Pakaian Olah Raga 77Stel dan Baju Sutera Mandar 77 Stel
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 23 April 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 5 Agustus 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara ahli).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Honor Tim PNS Pengadaan, Penerima dan Pemeriksa</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Fotocopy dan Jilid</li> </ul>	CV.BJ. Monika
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.98.294.350,- APBD	Rp.97.162.450,- (98.85%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 77 stel pakaian dinas yang telah tersedia selama setahun.	Jumlah 77 stel pakaian dinas yang telah tersedia selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	



IV. Program: **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal merupakan kegiatan rutin dan prioritas di sekretariat guna meningkatkan mutu dan kualitas SDM dalam hal ini keahlian dan keterampilan aparatur khususnya sesuai dengan tingkatan Eselon IV dan Eselon III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas SDM dalam hal ini keahlian dan keterampilan aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li> <li>- Adanya bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas SDM.</li> </ul>	
3.	Sasaran	5 Orang	Adanya 5 Orang pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis dan mengikuti Sosialisasi
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat dan Tanggal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalimantan, Hotel Aston Residence Jl. Jendral Sudirman No.7 Kalandasa Ilir Balikpapan Kalimantan Timur. Tgl 20 Februari 2019</li> <li>- Jakarta, Hotel Aston Rasuna Jakarta (Tower A-Lower Ground) Kompleks Apartemen Taman Rasuna Jln. Ilir Rasuna Said Jakarta Tgl 04 s/d 07Maret 2019</li> <li>- Makassar, Claro Jl. Andi Pattarani Makassar No.3 Tgl 30 Juni s/d 02 Juli 2019</li> <li>- Makassar, d'Maleo Hotel</li> </ul>	<p>Tempat dan Tanggal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalimantan, Hotel Aston Residence Jl. Jendral Sudirman No.7 Kalandasa Ilir Balikpapan Kalimantan Timur. Tgl 20 Februari 2019</li> <li>- Jakarta, Hotel Aston Rasuna Jakarta (Tower A-Lower Ground) Kompleks Apartemen Taman Rasuna Jln. Ilir Rasuna Said Jakarta Tgl 04 s/d 07Maret 2019</li> <li>- Makassar, Claro Jl. Andi Pattarani Makassar No.3 Tgl 30 Juni s/d 02 Juli 2019</li> <li>- Makassar, d'Maleo Hotel</li> </ul>

		Makassar Jl. Pelita Raya Tgl.	Makassar Jl. Pelita Raya Tgl.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Fotocopy dan Jilid</li> </ul>	Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis dan mengikuti Sosialisasi
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.33.300.000,- APBD	Rp.18.500.000,- (55,56%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 5 PNS yang mengikuti Bimtek selama setahun.	Jumlah 5 PNS yang mengikuti Bimtek selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

IV. Program : **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

2. Kegiatan : Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan, peningkatan peran dan fungsi kesatuan bangsa dan politik pada Provinsi Sulawesi Barat, yakni mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat secara menyeluruh di Provinsi Sulawesi Barat.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksud diadakannya kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat secara berdaya guna dan berhasil guna.</li> <li>- Tujuan diadakannya kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah adalah melakukan penilaian atas eksentitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah – langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur serta menentukan system dan tatacara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah.	50 Peserta
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : - Lt.III Ruang Oval Gubernur Sulawesi Barat - Auditorium Lt. IV. Kantor Gubernur Sulawesi Barat Tanggal : - Jumat, 22 Maret 2019 - Jumat 22 November 2019	Tempat : Lt.III Ruang Oval Gubernur Sulawesi Barat - Auditorium Lt. IV. Kantor Gubernur Sulawesi Barat Tanggal : - Jumat 22 Maret 2019 - Jumat 22 November 2019

5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Honorarium PNS</li> <li>- Belanja ATK berupa Seminar Kit, Materai, Spanduk , Dokumentasi</li> <li>- Belanja Honorarium Non PNS</li> <li>- Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Akomodasi Peserta</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Tenaga Ahli, Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, MC dan Dirigen</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 310.460.000,- APBD	Rp.266.029.000,- (85,69%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 50 peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah dan 4 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 50 peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah dan 3 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Ada satu kali pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik sebagaimana mestinya dikarenakan oleh jadwal permintaan pelaksanaan kegiatan terlambat dan waktu sudah dipenghujung akhir tahun.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya koordinasi terlebih dahulu dengan tim harian terkait untuk jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

IV. Program : **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

3.Kegiatan : Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se –Provinsi Sulawesi Barat.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se- Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dan perencanaan pembangunan daerah, serta peningkatan peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat baik di Provinsi maupun di Kabupaten se – Provinsi Sulawesi Barat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan, pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah sesuai dinamika pembangunan demi untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat secara menyeluruh di Provinsi Sulawesi Barat, hal ini dapat dicapai tentunya dengan adanya sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten Badan Kesbangpol. se – Provinsi Sulawesi Barat.	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <p>Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat untuk mensinkronisasikan Program dan Kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten yang terlaksana pada Tahun Anggaran 2019, Sehingga hasil yang diperoleh dapat menentukan seberapa besar laporan realisasi fisik dan keuangan serta kebijakan yang akan datang.</p> <p>Tujuan</p> <p>Adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman yang sama dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan peran dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya kegiatan rapat kerja teknis dan	Sasaran kegiatan ini ditujukan kepada para Kepala Badan

		sinkronisasi program kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik se-Provinsi Sulawesi Barat.	Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris Badan dan yang membidangi Sub. Bagian Program dan Pelaporan baik di Provinsi maupun di Kabupaten.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Hotel Diana, Jl. Emmy Saelan No.27 Mamuju Tanggal : 23 Juli 2019	Tempat : Hotel Diana, Jl. Emmy Saelan No.27 Mamuju Tanggal : 23 Juli 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat Tulis Kantor berupa seminar kit</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transport</li> <li>- Belanja Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Akomodasi Peserta</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Tenaga Ahli, Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, MC dan Dirigen</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 52.271.650,- APBD	Rp.51.970.000,- (99,42%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 30 peserta yang mengikuti Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 1 kali pelaksanaan rapat.	Jumlah 30 peserta yang mengikuti Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 1 kali pelaksanaan rapat.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya mensinkronisasikan program kegiatan yang ada di Kabupaten dan di Provinsi</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

V. Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran merupakan upaya untuk mengetahui capaian realisasi fisik maupun keuangan pada tiap semesteran, maka diperlukan suatu bentuk laporan semesteran yang menggambarkan perkembangan / capaian secara fisik maupun keuangan yang telah dilaksanakan per-semester.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk menggambarkan perkembangan / capaian secara fisik maupun keuangan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan per-semesteran.</li> <li>- Adanya laporan fisik dan keuangan semesteran.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran.	Adanya laporan keuangan semesteran.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 30 September 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 30 September 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Honor Non PNS</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sulbar
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.10.500.000,- APBD	Rp.10.500.000,- (100%).
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 1 dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun selama setahun.	Jumlah 1 dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

V. Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

2. Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun merupakan upaya untuk mengetahui perkembangan fisik dan keuangan akhir tahun yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun, maka diperlukan suatu bentuk laporan keuangan yang terangkum dalam bentuk laporan keuangan akhir tahun yaitu Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan sehingga akhirnya hasilnya dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.</li> <li>- Adanya laporan keuangan akhir tahun.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Adanya 1 (satu) dokumen laporan keuangan akhir tahun.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 23 Desember 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 23 Desember 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Honor Non PNS</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.10.000.000,- APBD	Rp.9.810.000,- (98,10%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 1 dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun selama setahun.	Jumlah 1 dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	



V. Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

3. Kegiatan : Penyusunan RKA / DPA – SKPD.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Penyusunan RKA / DPA – SKPD merupakan guna untuk tercapainya perencanaan program kegiatan tahun anggaran berikutnya, maka kegiatan penyusunan RKA Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 perlu dilaksanakan.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk tercapainya program kegiatan dan penyusunan RKA / DPA Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li> <li>- Adanya penyusunan dokumen RKA / DPA Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya penyusunan RKA / DPA Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Adanya 2 Dokumen RKA / DPA Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Honor Non PNS</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.12.500.000,- APBD	Rp.12.482.000,- (99,86%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 2 dokumen penganggaran RKA / DPA - SKPD yang tersusun selama setahun.	Jumlah 2 dokumen penganggaran RKA / DPA - SKPD yang tersusun selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

V. Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

4. Kegiatan: Penyusunan RKA – P / DPPA – SKPD.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Penyusunan RKA-P / DPPA- SKPD merupakan penyempurnaan dari program kegiatan Tahun Anggaran 2018 dilakukan melalui penyusunan program anggaran perubahan.	
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mewujudkan penyempurnaan dari program kegiatan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui penyusunan program anggaran perubahan.</li> <li>- Adanya penyusunan dokumen RKA – P / DPPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya penyusunan RKA – P / DPPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Ada 12 Dokumen RKA – P / DPPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 30 Oktober 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 30 Oktober 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Honor Non PNS</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.12.500.000,- APBD	Rp. 12.500.000,- (100%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 2 dokumen penganggaran perubahan RKA-P / DPPA - SKPD yang tersusun selama setahun.	Jumlah 2 dokumen penganggaran perubahan RKA-P / DPPA - SKPD yang tersusun selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

V. Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

5. Kegiatan : **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan program SKPD pada era reformasi birokrasi yang sedang marak dilakukan di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Barat pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang sangat mendasar dalam jangka panjang demi mencapai suatu keberhasilan dalam memonitoring, mengevaluasi program kegiatan serta melaporkan. Proses monitoring, evaluasi program kegiatan dan pelaporan sebagai bagian krusial dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan, Monitoring dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan melalui program kegiatan apakah telah sesuai atau tidaknya dengan apa yang telah direncanakan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk diambil tindakan antisipatif, berupa koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan, dan klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. monitoring dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan 6 (enam) bulan dan tahunan.</p>	
2.	Maksud Tujuan	<p>Maksud</p> <p>Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat untuk memonitoring, mengevaluasi, dan mengukur serta melaporkan seberapa jauh capaian kinerja program kegiatan yang telah terlaksana pada Tahun Anggaran 2019, sehingga hasil yang diperoleh dapat menentukan seberapa besar laporan realisasi fisik dan keuangan serta kebijakan yang akan datang.</p> <p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.</li> <li>- Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program.</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan.</li> <li>- Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk meaksanakan kegiatan.</li> <li>- Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan – kesulitan dan hambatan – hambatan selama kegiatan.</li> <li>- Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan program SKPD.	Untuk meningkat pola pikir pegawai khususnya pada organisasi perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat lebih pro – aktif dan antisipasi terkait penyimpangan – penyimpangan dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati, dan apakah target indikator capaian kinerja dari pada program kegiatan tersebut telah sesuai dengan apa telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama (IKU).
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 05 Desember 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 05 Desember 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Seminar Kit / ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Cetak, Foocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> </ul>	<p>6 Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mamuju</li> <li>- Pasangkayu</li> <li>- Mamuju Tengah</li> <li>- Majene</li> <li>- Polewali</li> <li>- Mamasa</li> </ul>

6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.50.000.000,- APBD	Rp.49.066.500,- (98,13%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 1 dokumen laporan monev dan pelaporan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama setahun.	Jumlah 1 dokumen laporan monev dan pelaporan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran dan evaluasi pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

V.Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

6. Kegiatan : Penyusunan Renstra SKPD (Perencanaan 5 Thn) dan Renja SKPD (Perencanaan 1 Thn).

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD (Perencanaan 5 Thn) dan Renja merupakan suatu kegiatan yang merekap seluruh rangkaian penyusunan program dan kegiatan untuk 5 Tahun Anggaran ke depan ; untuk menyusun rangkaian program dan kegiatan 1 Tahun Anggaran ; menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; serta menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Didalam kegiatan tersebut telah tersusun secara sistematis baik hal perencanaan anggaran dan penyusunan laporan tersebut dapat kita lihat kinerja dari SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun Anggaran 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	Untuk penyusunan Renstra dan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Barat yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai dasar penyusunan RKPJ dan DPA – RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>2. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta Rencana Kerja pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.</li> </ol>	
3.	Sasaran	1 Dokumen Renstra, dan 1 Dokumen Renja.	1 Dokumen Renstra, dan 1 Dokumen Renja.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 03 Oktober 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 03 Oktober 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Materai - Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid - Belanja Makan dan Minum - Belanja Jasa Honor Non PNS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 14.678.600,- APBD	Rp. 14.678.600,- (100%)

7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 2 dokumen perencanaan strategi dan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama setahun.	Jumlah 2 dokumen perencanaan strategi dan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li><li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li></ul>	

V.Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

7. Kegiatan : Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD, dan LKPJ.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ suatu kegiatan yang merekap seluruh rangkaian penyusunan program dan kegiatan untuk 5 Tahun Anggaran ke depan ; untuk menyusun rangkaian program dan kegiatan 1 Tahun Anggaran ; menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; serta menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Didalam kegiatan tersebut telah tersusun secara sistematis baik hal perencanaan anggaran dan penyusunan laporan tersebut dapat kita lihat kinerja dari SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun Anggaran 2019	
2.	Maksud dan Tujuan	Untuk penyusunan Renstra dan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Barat yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai dasar penyusunan RKPD dan DPA – RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>2. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta Rencana Kerja pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.</li> </ol>	
3.	Sasaran	1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen LPPD dan 1 Dokumen LKPJ	1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen LPPD dan 1 Dokumen LKPJ
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 18 Desember 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 18 Desember 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Jasa Honor Non PNS</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 14.734.900,- APBD	Rp. 14.544.900,- (98,71%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 3 dokumen pelaporan inti : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKijP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang tersusun selama setahun.	Jumlah 3 dokumen pelaporan inti : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKijP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang tersusun selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

**B. Urusan Wajib**

VI. Program : **Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.**

1. Kegiatan : Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang		<p>Kegiatan Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Hubungan antar individu dalam masyarakat yang selama ini bersifat nasional juga turut berkembang menjadi internasional. Hal ini sebagai sebuah kemajuan besar yang dapat membawa manfaat bagi kepentingan nasional kita. Pola hubungan masyarakat dunia yang semakin terbuka dan cair. Mendorong pula pergerakan dan perlintasan orang asing di Indonesia. Keberadaan orang asing dan lembaga asing di Indonesia sekarang dan kedepan akan terus berkembang, mengingat faktor eksternal serta besarnya faktor internal atau potensi daya tarik yang dimiliki Indonesia pada tingkat hubungan internasional. Pergerakan dan perlintasan orang asing maupun lembaga asing, berkaitan erat dengan keberadaan dan kegiatan mereka di Indonesia. Keberadaan dan kegiatan orang asing, baik secara individu ataupun sebagai lembaga, idealnya sesuai dengan asas kemanfaatan, dimana keberadaan dan kegiatan orang asing dan lembaga asing harus mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum.</p>
2.	Maksud dan Tujuan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan, mempersiapkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan pengawasan orang asing dan lembaga asing di Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah dalam pengawasan orang asing dan lembaga asing.</li> <li>- Penguatan koordinasi dan kerjasama diantara lembaga pemerintah dan lintas sektoral serta pemangku kepentingan terkait.</li> <li>- Mendorong upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap orang asing dan lembaga asing tanpa menagabaikan faktor keamanan dan kepentingan nasional.</li> <li>- Untuk menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan dalam</li> </ul>

		<p>negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional, serta agar para pemangku kepentingan meningkatkan keterpaduan dan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai tugas, fungsi, dan keamanan dan kewenangan masing-masing berdasarkan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar pemetaan orang asing dan lembaga asing cepat diketahui lebih awal, untuk melakukan preventif dan pencegahan, sehingga TIMPORA dengan melibatkan peran serta dinas/Instansi unsurterkait lainnya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Antara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA)</li> <li>- Unsur TNI dan POLRI</li> <li>- Instansi Terkait</li> <li>- Ormas dan LSM</li> <li>- Media Cetak dan Elektronik</li> </ul>	60 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel Lilianto, Polewali</p> <p>Waktu : 19 Juni 2019</p>	<p>Tempat : Hotel Lilianto, Polewali</p> <p>Waktu : 19 Juni 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sulbar.

		Kegiatan - Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.150.000.000,-	Rp.143.914.900,- (95,94%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 6 kabupaten yang dipantau untuk mengawasi orang asing dan lembaga asing selama setahun.	Jumlah 6 kabupaten yang dipantau untuk mengawasi orang asing dan lembaga asing selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terrealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

VI. Program : **Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.**

2. Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang		<p>Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 07 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi dengan seluruh unsur tingkatan pemerintahan, baik di tingkat Nasional, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota. Penanganan konflik sosial sebagaimana dimaksud juga harus dilakukan secara komprehensif, integrative, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran melalui langkah-langkah pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan konflik.</p> <p>Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten / Kota juga. Salah satu tugas dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yaitu menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang meliputi kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tersebut, dilakukan mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang di setiap tingkatan pemerintahan terhadap target keberhasilan rencana aksi dalam waktu / periode tertentu.</p> <p>Penginputan Laporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2019 terbagi 4 (Empat) diantaranya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periode Target B.04 (Bulan April) Tahun 2019;</li> <li>2. Periode Target B.08 (Bulan Agustus) Tahun 2019; dan</li> <li>3. Periode Target B.12 (Bulan Desember) Tahun 2019.</li> </ol>

		<p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka menjalankan amanat Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial khususnya maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019, yaitu untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi, keterpaduan, serta sinergitas antar seluruh unsur aparatur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten</li> <li>• Tujuan Yakni sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kinerja Tim Terpadu penanganan konflik Sosial, yang salah satunya diukur dari pencapaian target keberhasilan dalam pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik social pada masing-masing Provinsi, khususnya pada target pelaporan</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Kesbangpol Prov. Sulbar</li> <li>2. Biro Tapem Setda Prov. Sulbar</li> <li>3. Dinas Sosial Prov. Sulbar</li> <li>4. Diknas Prov. Sulbar</li> <li>5. Badan Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak Prov. Sulbar</li> <li>6. Dinas Dukcapil Prov. Sulbar</li> <li>7. Dinas Pertanian Prov. Sulbar</li> <li>8. Polda Sulbar</li> </ol>	<p>Sasaran kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Kesbangpol Prov. Sulbar</li> <li>2. Biro Tapem Setda Prov. Sulbar</li> <li>3. Dinas Sosial Prov. Sulbar</li> <li>4. Diknas Prov. Sulbar</li> <li>5. Badan Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak Prov. Sulbar</li> <li>6. Dinas Dukcapil Prov. Sulbar</li> <li>7. Dinas Pertanian Prov.</li> </ol>

		<p>9. Korem 142 Tatag</p> <p>10. Lanal Mamuju</p> <p>11. Kantor Imigrasi Sulbar</p> <p>12. Kanwil Kumham Prov. Sulbar</p> <p>13. Kanwil Kemenag Prov. Sulbar</p> <p>14. BPN Prov. Sulbar</p> <p>15. Unsur Intelijen</p>	<p>Sulbar</p> <p>8. Polda Sulbar</p> <p>9. Korem 142 Tatag</p> <p>10. Lanal Mamuju</p> <p>11. Kantor Imigrasi Sulbar</p> <p>12. Kanwil Kumham Prov. Sulbar</p> <p>13. Kanwil Kemenag Prov. Sulbar</p> <p>14. BPN Prov. Sulbar</p> <p>15. Unsur Intelijen</p>
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel Pantai Indah Jl. Badau Nomor 25 Mamuju</p> <p>Waktu :09 Desember 2019</p>	<p>Tempat : Hotel Pantai Indah Jl. Badau Nomor 25 Mamuju</p> <p>Waktu :09 Desember 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 200.000.000,-APBD	Rp.187.051.400,- (93,53%)

7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan konflik sosial dan 2 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 40 peserta kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan konflik sosial dan 2 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	



VI. Program : **Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

3. Kegiatan : Pemantauan dan Pengamanan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Pemantauan dan Pengamanan Pelaksana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan. Sehingga dengan demikian, pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan merupakan pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Oleh karena itu, untuk suksesnya pemilu saja, tapi juga harus didukung seluruh pemangku kepentingan pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan. Diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas pemilu tersebut.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan Kabupaten serta instansi unsure terkait lainnya beserta jajarannya dalam upaya menciptakan pemilu damai, aman dan demokratis.</li> <li>- Agar Terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif melalui rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 menuju stabilitas daerah, rangka menyambut pemilihan umum (pemilu) tanggal 17 April 2019 mendatang.</li> <li>- Terciptanya serta terpelihara situasi dan kondusi yang kondusif bagi penyelenggara pemerintah, pembangunan dan kehidupan bermasyarakat di daerah melalui peningkatan pembauran kebangsaan menuju stabilitas daerah provinsi Sulawesi Barat pada khususnya dan stabilitas nasional pada umumnya.</li> <li>- Sebagai wadah koordinasi, konsolidasi dan penguatan antara pemerintahan provinsi kabupaten serta instansi dan unsur yang terkait dalam pemantapan persiapan pra maupun pasca pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden</li> </ul>	

		<p>tahun 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah dalam pelaksanaan pemilu presiden dan Wakil presiden tahun 2019.</li> </ul> <p>Tujuan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertujuan meminimalisir berbagai bentuk permasalahan yang mengemuka, baik pra maupun pasca pelaksanaan kegiatan politik lima tahun.</li> <li>- Meningkatkan sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan pemilu dalam upaya mewujudkan stabilitas yang kondusif serta menciptakan pemilu yang demokratis.</li> <li>- Dalam rangka penciptaan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu sehingga perlu diantisipasi sedini mungkin dengan koordinasi yang baik Badan KesbangPol se Sulbar serta para intelijen dari unsure BIN, TNI, Polisi, serta kejaksaan se – sulbar.</li> <li>- Membangun koordinasi, dan komitmen sama untuk mengawal pemilu damai, amin, dan demokratis, mencegah dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan pelanggaran pemilu.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Sasaran Kegiatan Pemantaun dan Pengamanan Pelaksana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2019 di 6 (Enam) Kabupaten Se Sulawesi Barat.	Sasaran Kegiatan Pemantaun dan Pengamanan Pelaksana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2019 di 6 (Enam) Kabupaten Se Sulawesi Barat.
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat :Ruang Rapat Lt.II Kantor Gubernur Sulawesi Barat Waktu : 11 April 2019	Tempat :Ruang Rapat Lt.II Kantor Gubernur Sulawesi Barat Waktu : 11 April 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sulbar dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.67.308.352,-	Rp.67.308.352,- (100%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 6 kabupaten yang dipantau pengamanan pelaksanaan pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif, 40 orang peserta yang mengikuti rapat hasil pemantauan, dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 6 kabupaten yang dipantau pengamanan pelaksanaan pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif, 40 orang peserta yang mengikuti rapat hasil pemantauan, dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

VII. Program : **Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**

1. Kegiatan : **Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat merupakan keberhasilan dan suksesnya pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak oleh karena itu dibutuhkan peran dan dukungan semua komponen bangsa untuk membangun dan menciptakan stabilitas keamanan dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), Perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksi dan pencegahan dini. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, keterpaduan, serta sinergitas antar seluruh unsure terkait dalam FKDM dan TKD sehingga tetap terjaga dan terpelihara kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan di daerah</li> <li>- Menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta instansi dan unsure terkait lainnya beserta jajarannya dalam upaya pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah</li> </ul> <p>Tujuan</p> <p>yakni meningkatkan partisipasi seluruh unsur FKDM dan TKD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi terjaganya kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas</p>	

		keamanan dan ketertiban umum di daerah	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Kesbangpol dan Kabid Kewaspadaan Badan Kesbangpol se-Sulawesi Barat.</li> <li>2. Tim Kewaspadaan di daerah (TKD) Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>3. Unsur Forum Kewaspadaan Dini MASYARAKT (FKDM) Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>4. Unsur Intelijen.</li> </ol>	<p>Sasaran kegiatan Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Kesbangpol dan Kabid Kewaspadaan Badan Kesbangpol se-Sulawesi Barat.</li> <li>2. Tim Kewaspadaan di daerah (TKD) Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>3. Unsur Forum Kewaspadaan Dini MASYARAKT (FKDM) Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>4. Unsur Intelijen.</li> </ol>
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat :Aula Hotel Pantai Indah Jln. Badau, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Prov. Sulbar</p> <p>Waktu : Jumat, 18 Oktober 2019</p>	<p>Tempat Aula Hotel Pantai Indah Jln. Badau, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Prov. Sulbar</p> <p>Waktu : Jumat, 18 Oktober 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sulbar

		Pendukung dan Peserta Kegiatan	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.130.000.000,-	Rp.127.409.200,- (98,01%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta yang mengikuti rapatfasilitasi FKDM selama setahun.	Jumlah 40 peserta yang mengikuti rapatfasilitasi FKDM selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

VIII. Program : **Pendidikan Politik Masyarakat.**

1. Kegiatan : Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula sebagai Negara demokratis, Kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan, dimana kehadirannya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat, penyeimbang kekuatan politik serta sebagai saran pengkritik dan control terhadap pemerintah yang berkuasa.  Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik biasa diartikan sebagai usaha sadar dan tersismatis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang, sehingga diberikanlah pendidikan politik bagi masyarakat oleh parpol dan lembaga demokrasi lainnya baik di Provinsi dan Kabupaten di seluruh Indonesia.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik, serta berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, sehingga para pemilih pemula memperoleh gambaran tentang jejak rekan parpol, dikhawatirkan akan muda digiring untuk memilih caleg atau parpol tertentu yang sebenarnya belum tentu mampu untuk mengakomodasi aspirasi mereka. Lebih jauh lagi masifnya pemberitaan tentang kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kader parpol dikhawatirkan akan membuat remaja bersikap apatis terhadap politik yang pada akhirnya	

		<p>tidak menggunakan hak pilihnya alias golput</p> <p>Tujuan - Memberikan pemahaman kepada pemilih pemula mengenai peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang partai politik dan pemilu serta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemahaman berbagai hal tentang pemilu dan menjadikan pemilih yang cerdas yakni pemilih yang sadar menggunakan hak pilihannya dan dapat memilih pemimpin yang berkualitas demi perbaikan masa depan bangsa dan negara</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran kegiatan Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula Antara Lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan /Kantor Kesbang Pol Kab. Polewali Mandar.</li> <li>2. Badan /Kantor Kesbang Pol Kab.Mamuju</li> <li>3. Badan/Kantor Kesbang Pol Kab. Pasangkayu</li> <li>4. Para warga Negara yang telah memiliki EKTP.</li> <li>5. Siswa/siswi SMA/SMK sederajat.</li> </ol>	<p>400 Orang Pemilih dan 5 Kali Pelaksanaan</p>
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aula Hotel Istana Wonomulyo Kab. Polewali Mandar</li> <li>- Hotel d’ Maleo &amp; Convention Kabupaten Mamuju</li> <li>- Hotel Bumi Raya Kab. Polewali Mandar</li> <li>-Hotel Tri Sakti Pasangkayu</li> </ul> <p>Waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamis, 14 Februari 2019</li> <li>- Jumat, 15 Maret 2019</li> <li>- Jumat, 29 Maret 2019</li> <li>- Sabtu, 07 Desember 2019</li> </ul>	<p>Tempat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aula Hotel Istana Wonomulyo Kab. Polewali Mandar</li> <li>- Hotel d’ Maleo &amp; Convention Kabupaten Mamuju</li> <li>- Hotel Bumi Raya Kab. Polewali Mandar</li> <li>- Hotel Tri Sakti Pasangkayu</li> </ul> <p>Waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamis, 14 Februari 2019</li> <li>- Jumat, 15 Maret 2019</li> <li>- Jumat, 29 Maret 2019</li> <li>- Sabtu, 07 Desember 2019</li> </ul>



5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.680.763.000,- APBD	Rp.666.778.754,- (97,95%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 400 orang pemilih yang mengikuti sosialisasi pendidikan budaya politik bagi pemilih pemula dan 5 kali pelaksanaan sosialisasi.	Jumlah 400 orang pemilih yang mengikuti sosialisasi pendidikan budaya politik bagi pemilih pemula dan 5 kali pelaksanaan sosialisasi.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

IX. Program : **Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.**

1. Kegiatan : Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan Ormas.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang		<p>Kegiatan Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan Ormas merupakan yang telah membentuk tim yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan data dan informasi berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan Ormas, melakukan registrasi identifikasi serta penanganan Ormas dan melakukan monitoring dan evaluasi tidak lanjut pembinaan fasilitasi, identifikasi Organisasi Kemasyarakatan. Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah perlunya identifikasi, evaluasi dan penanganan Ormas, dalam menciptakan tertib administrasi dari Ormas tersebut dan juga dapat diketahui perkembangan dari Organisasi Masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan itu sangat relevan untuk terus menerus memberikan evaluasi identifikasi dan langkah-langkah yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah sehingga mampu menciptakan tata kelola terkait Dinamika Organisasi tersebut.</p>
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan Ormas dimaksudkan sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitasi serta upaya membina, memelihara dan meningkatkan kerjasama demi kemajuan Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Dimaksudkan sebagai upaya membina, memelihara dan meningkatkan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang fungsi, hak dan kewajiban Ormas di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Untuk peningkatan kapasitas fungsi dan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Sulawesi Barat.</li> </ul> <p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitasi serta kajian aktivitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Sulawesi Barat.</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adalah untuk memperkuat sistem kinerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pemantauan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan secara terencana dan sistematis.</li> <li>- Terlaksananya komunikasi dan koordinasi serta terciptanya kesamaan persepsi kegiatan dan keberadaan Ormas di Sulawesi Barat.</li> <li>- Terciptanya data base Ormas di Sulawesi Barat baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar.</li> <li>- Melakukan pemantauan, rapat koordinasi dan evaluasi, keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Terbinanya Ormas sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Dialog Pemerintah Dengan Ormas Antara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesbangpol se Provinsi Sulawesi Barat</li> <li>- Ormas</li> <li>- LSM</li> <li>- Tokoh Masyarakat</li> <li>- Tokoh Pemuda</li> <li>- Mahasiswa</li> </ul>	40 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel Pantai Indah</p> <p>Waktu : 20 September 2019</p>	<p>Tempat : Hotel Pantai Indah</p> <p>Waktu : 20 September 2019</p>
5.	Keperluan Bahsan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.

		<p>penggandaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.100.000.000,- APBD	Rp.98.779.600,- (98,78%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 10 Ormas yang telah mendapat fasilitasi, identifikasi, dan evaluasi serta dokumen laporan, 40 peserta ormas yang mengikuti rapat dengan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 10 Ormas yang telah mendapat fasilitasi, identifikasi, dan evaluasi serta dokumen laporan, 40 peserta ormas yang mengikuti rapat dengan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

IX. Program : **Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.**

2. Kegiatan :Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)  
Kabupaten Se – Sulawesi Barat

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	-	
2.	Maksud dan Tujuan	-	
3.	Sasaran	-	-
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat - Waktu : -	Tempat : - Waktu : -
5.	Keperluan Bahsan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	-	-
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.0 ,- APBD	Rp.0 ,- (0%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	-	-
8.	Permasalahan	Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten se-Sulawesi Barat tidak dapat terealisasi di APBD Pokok, karena terdapat kesalahan dalam penginputan salah masuk Program sehingga kegiatan tersebut harus dibintang, dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan nanti setelah diadakan APBD Perubahan.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya merencanakan, mengidentifikasi, mengelompokkan kegiatan yang sesuai dengan programnya masing-masing dengan baik.</li> <li>- Perlunya ketelitian dalam proses penginputan RENJA, RKPD dan RKA/DPA.</li> </ul>	

IX. Program : **Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.**

3.Kegiatan :Dialog Pemerintah Dengan Ormas.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan, membawa paradigma baru tata kelola Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>Pertumbuhan jumlah Ormas sebaran dan jenis kegiatan dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas, untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>Dengan demikian Ormas mempunyai peranan yang sangat strategis, sebagai mitra pemerintah untuk memberdayakan masyarakat guna mewujudkan tujuan nasional dan jika amanat Undang-Undang tentang pengaturan Ormas ini dipahami dan dihayati pimpinan dan anggota Ormas, maka tidak akan ada lagi Ormas yang bertindak anarkis, sampai merusak atau bersikap brutal seperti dalam unjuk rasa.</p> <p>Bahwa dalam rangka penataan dan peningkatan peran serta Orkesmas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan Ormas maupun Lembaga Swasta Kemasyarakatan lainnya oleh pengurus harus memberitahukan kepada Pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi dalam sebuah forum pertemuan yang diharapkan dapat mengatasi berbagai isu-isu strategis bidang ke-Ormas-an mana tadi dengan melibatkan stakeholder terkait baik unsure pemerintah maupun masyarakat yang berhimpun dalam sebuah organisasi kemasyarakatan.</li> <li>- Adalah sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitasi serta upaya membina, memelihara dan meningkatkan persatuan dan</li> </ul>	

		<p>kesatuan serta kerjasama demi kemajuan Provinsi Sulawesi Barat yang Malaqbiq.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai upaya membina, memelihara dan meningkatkan keberadaan Ormas meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang fungsi, hak dan kewajiban Ormas di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Untuk membangun sinergitas antara Ormas yang berada di Provinsi Sulawesi Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menyamakan persepsi tentang ketugasan dan mekanisme kerja.</li> </ul> <p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan dialog dengan tujuan untuk saling bertukar informasi serta memberikan gagasan terhadap permasalahan yang terjadi.</li> <li>- Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk membangun komunikasi yang efektif antara Ormas, LSM, OKP serta organisasi kemahasiswaan bersama pemerintah daerah untuk dapat berkontribusi positif dalam pembangunan daerah.</li> <li>- Terjalannya komunikasi dan koordinasi serta terciptanya dengan baik dan kesamaan langkah dan tindak antara Ormas dan Pemerintah Provinsi yang berada di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Dialog ini bertujuan untuk mewujudkan situasi dan kondisi daerah yang kondusif, sehingga semakin memicu lancarnya pelaksanaan pembangunan di daerah.</li> <li>- Agar pemerintah bisa mendapatkan berbagai masukan dan informasi baik di daerah maupun di pusat. Sebagai input dalam perumusan dan pengembangan kebijakan ke-Ormas-an.</li> <li>- Agar terbinanya Ormas sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mendukung peran pemerintah dengan menjadi juru damai dan penjaga keamanan dari kemungkinan konflik-konflik antar kepentingan dalam masyarakat.</li> <li>- Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan politik dalam negeri, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan Ormas dan lembaga Nirlaba lain.</li> </ul>
--	--	---

		Sehingga diharapkan peran sosial kontrol dapat dijalankan lebih maksimal.	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Dialog Pemerintah Dengan Ormas Antara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesbangpol se Provinsi Sulawesi Barat</li> <li>- Ormas</li> <li>- LSM</li> <li>- Tokoh Masyarakat</li> <li>- Tokoh Pemuda</li> <li>- Mahasiswa</li> </ul>	40 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel D'Maleo Jl. Yos Sudarsi No.52</p> <p>Waktu : Senin, 23 Mei 2019</p>	<p>Tempat : Hotel D'Maleo Jl. Yos Sudarsi No.52</p> <p>Waktu : Senin, 23 Mei 2019</p>
5.	Keperluan Bahsan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.74.643.600,- APBD	Rp.74.643.400,- (100%)



7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta yang mengikuti dialog pemerintah daerah dan Ormas dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 40 peserta yang mengikuti dialog pemerintah daerah dan Ormas dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

IX. Program : **Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.**

4. Kegiatan : Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	-	
2.	Maksud dan Tujuan	-	
3.	Sasaran	-	-
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat - Waktu : -	Tempat - Waktu : -
5.	Keperluan Bahsan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	-	-
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.0 ,- APBD	Rp.0 ,- APBD
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	-	-
8.	Permasalahan	Kegiatan Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama tidak dapat terealisasi di APBD Pokok, karena terdapat kesalahan dalam penginputan salah masuk Program sehingga kegiatan tersebut harus dibintang, dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan nanti setelah diadakan APBD Perubahan.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya merencanakan, mengidentifikasi, mengelompokkan kegiatan yang sesuai dengan programnya masing-masing dengan baik.</li> <li>- Perlunya ketelitian dalam proses penginputan RENJA, RKPD dan RKA/DPA ke RKA-P/DPPA.</li> </ul>	

X. Program : **Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.**

1. Kegiatan : Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama merupakan kegiatan yang membahas tentang kerukunan hidup beragama yang merupakan suasana komunikasi yang harmonis dalam dinamika interaksi antar umat beragama, baik interaksi sosial maupun antar kelompok keagamaan. Kerukunan tersebut tercermin dalam pergaulan hidup keseharian umat beragama yang berdampingan secara damai, toleran, saling menghargai kebebasan keyakinan dan beribadat sesuai dengan ajaran agama yang dianut, serta adanya kesediaan dan kemauan melakukan kerjasama sosial dalam membangun masyarakat dan bangsa.</p> <p>FKUB kelak akan berperan besar yang tidak hanya menyangkut persoalan kerukunan, namun juga menyangkut pemberdayaan umat secara keseluruhan. Artinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah yang tidak hanya bekerja menjembatani aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah. Namun lebih dari itu, sebagai “kendaraan” dalam rangka akselerasi penyelesaian persoalan-persoalan umat beragama di lapangan. Peran ini sangat beralasan, mengingat bahwa kedepan kiranya Forum ini dituntut untuk tidak hanya sekedar memfokuskan diri pada hal-hal yang menyangkut banyak kepentingan dan hal-hal yang luas lagi termasuk membangun berbagai kerjasama dalam hal pemberdayaan umat yang terpuruk akibat ketimpangan sosial serta berbagai persoalan yang ditinggalkan akibat konflik.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimaksudkan agar keberadaan FKUB di daerah sangat diperlukan. Peran FKUB terbukti mampu mengelola kerukunan beragama, terutama dalam situasi tertentu. Peran FKUB sangat dibutuhkan, Pemerintah daerah maupun perlu meningkatkan kualitas</li> </ul>	

		<p>kerukunan umat beragama melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Oleh karenanya perlu adanya peningkatan peran dan kinerja FKUB khususnya Provinsi Sulawesi Barat, baik dalam aspek kelembagaan, jaringan, pendanaan serta pemberdayaan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan peningkatan peran FKUB dalam memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitasi membangun sinergitas antara Pemerintah dengan FKUB Provinsi Sulawesi Barat dengan FKUB Kabupaten / Kota, serta menyamakan persepsi tentang tugas dan mekanisme kerja Forum Kerukunan Umat Beragama se-Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Kegiatan ini dimaksudkan untuk merumuskan program kerja yang akan sesuai SK yang telah ditandatangani oleh Gubernur, dimana dibutuhkan kontribusi mereka dalam pembangunan nasional sangat penting, sehingga sinergitas mereka mutlak diperlukan.</li> <li>- Dimaksudkan untuk membahas langkah-langkah dari program kerja FKUB serta bagaimana mendayagunakan peran FKUB bagi upaya terciptanya kerukunan umat beragama baik di tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota, hingga kecamatan dengan didukung oleh Pemerintah sebagai fasilitator FKUB, selain itu untuk meningkatkan frekuensi pertemuan baik terjadwal maupun tidak terjadwal dikalangan anggota FKUB.</li> <li>- Membangun semangat kebersamaan agar wakil suatu agama yang menjadi anggota FKUB hendaknya diakui sebagai wakil semua unsure kelompok agama yang bersangkutan.</li> </ul> <p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjalinya komunikasi dan koordinasi serta terciptanya kesamaan langkah dan tindak antara Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Barat dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten / Kota.</li> <li>- Memelihara dan meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama serta persatuan dan kesatuan di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Menjalinkan komunikasi dan koordinasi serta kesamaan langkah dan</li> </ul>
--	--	--

		<p>tindak dalam upaya membangun kerukunan umat beragama serta mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi kehidupan beragama di Provinsi Sulawesi Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk memperlancar komunikasi antara Pemerintah dan Tokoh Agama dalam hal kerukunan umat beragama, menumbuhkan saling pengertian (Tasamuh) serta menyatukan visi dan misi bersama dalam mengemban amanah para pendiri Bangsa (The Founding Father) tentang kerukunan umat beragama, khususnya kerukunan umat beragama dengan Pemerintah sebagai wujud dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan RI.</li> <li>- Bertujuan untuk membina kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama serta umat beragama dengan pemerintah, sehingga terciptasuatu sinergitas antara umat beragama dengan pemerintah secara bersama-sama menuju kesejahteraan lahir dan batin.</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Dialog Pemerintah Dengan Ormas Antara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesbangpol se Provinsi Sulawesi Barat</li> <li>- Ormas &amp; LSM</li> <li>- Mahasiswa</li> <li>- Tokoh-Tokoh Agama</li> </ul>	40 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel Diana Waktu : 05 Desember 2019</p>	<p>Tempat : Hotel Diana Waktu : 05 Desember 2019</p>
5.	Keperluan Bahsan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.100.000.000,- APBD	Rp.85.751.600,- (85.75%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan peran FKUB dalam memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 40 peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan peran FKUB dalam memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Terdapat kesalahan dalam proses penginputan sehingga Kegiatan Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama dilaksanakan pada APBD Perubahan dan kegiatan tersebut tercantum dalam RKA-P/DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya merencanakan, mengidentifikasi, mengelompokkan kegiatan yang sesuai dengan programnya masing-masing dengan baik.</li> <li>- Perlunya ketelitian dalam proses penginputan RENJA, RKPD dan RKA/DPA ke RKA-P/DPPA.</li> </ul>	

X. Program : **Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.**

2. Kegiatan : Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama agama memiliki fungsi ambivalen (bercabang/ bertentangan). Di satu sisi berfungsi sebagai social cement (perekat sosial), yang dapat merekatkan hubungan individu maupun kelompok yang memiliki latar belakang etnik, bahasa dan kelas sosial ekonomi yang berbeda. Agama mampu berperan sebagai alat membangun solidaritas sekaligus loyalitas yang tinggi bagi para pemeluknya. Namun di sisi lain, agama juga mampu menjadi faktor signifikansi bagi munculnya konflik sosial yang luar biasa implikasinya karena melibatkan sisi-sisi yang paling dalam pada emosi manusia. Kemudian, apakah agama lebih mampu menjadi social cement (perekat sosial) atau sebaliknya sebagai conflict maker (pencipta konflik) akan sangat tergantung pada sikap dan tindakan para pemeluknya. Kesadaran akan pentingnya pluralism dan adanya struktur sosial yang adil atau baik dalam mengekspresikan keyakinan baik antar maupun intra agama akan mampu mewujudkan agama sebagai salah satu social cement dalam arti yang luas. Sementara sikap yang didasarkan pada truth claim (menganggap agamanya yang paling benar dan yang lain adalah salah) yang radikal akan lebih memunculkan agama sebagai conflict maker.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkan kembangkan kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Dimaksud sebagai wadah komunikasi, koordinasi serta upaya membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan dan kerukunan dalam menjalankan agama.</li> </ul> </li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalin komunikasi dan koordinasi serta kesamaan langkah dan tindak dalam upaya membangun kerukunan umat beragama serta mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi kehidupan beragama di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Membangun dan menciptakan rasa toleransi kerukunan umat beragama di wilayah Sulawesi Barat.</li> <li>- Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Identifikasi permasalahan moral agama yang mempengaruhi generasi muda Sulawesi Barat.</li> </ul> </li> </ul>	
3.	Sasaran	Sasaran kegiatan Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama antara lain berbagai Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama di Provinsi Sulawesi Barat.	Sasaran kegiatan Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama antara lain berbagai Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama di Provinsi Sulawesi Barat.
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat :Wisma Malaqbi Jl. Pababari, Mamuju - Prov. Sulawesi Barat Waktu : 02 April 2019	Tempat : Wisma Malaqbi Jl. Pababari, Mamuju - Prov. Sulawesi Barat Waktu : 02 April 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat



		Kegiatan - Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.173.704.667,-APBD	Rp.173.404.500,- (99,83%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta yang mengikuti temu tokoh agama, generasi muda antar umat beragama se-Sulbar dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 40 peserta yang mengikuti temu tokoh agama, generasi muda antar umat beragama se-Sulbar dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

XI. Program : **Fasilitas Politik Dalam Negeri**

1. Kegiatan : **Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga Legislatif maupun eksekutif, partai politik menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah namun, peran strategis tersebut tidak dengan sendirinya dapat berjalan dengan baik. Keterbatasan structural dan financial menyebabkan partai politik gagal menjalankan fungsi perantara. Keterbatasan struktural antara lain ditandai oleh lemahnya jaringan kerja dan organisasi sehingga partai politik tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat. Selain itu, kepemimpinan partai politik yang oligarkis, sering mengabaikan kepentingan masyarakat, konstituen ataupun anggota partai politik</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Tujuan Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2019 Provinsi Sulawesi Barat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui besaran bantuan keuangan Partai Politik Tahun 2019.</li> <li>2. Untuk mengetahui Tata Cara Penghitungan dan Penganggaran Bantuan Keuangan kepada partai Politik Dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>3. Untuk Mengetahui Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik.</li> <li>4. Untuk mengetahui Tata Cara Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.</li> <li>5. Untuk mengetahui Tata Cara Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Polittik.</li> <li>6. Agar terjalinnya sinergitas antara pihak parpol sebagai</li> </ol>	

		<p>penerima bantuan, pemerintah sebagai penyedia anggaran, dan Tim Verifikasi yang mengevaluasi dan merekomendasikan.</p> <p>7. Terciptanya suatu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan partai politik.</p>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Antara Lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2019.</li> <li>- Pengurus partai politik tingkat provinsi</li> <li>- Instansi terkait</li> </ul>	<p>Sasaran Kegiatan Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Antara Lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2019.</li> <li>- Pengurus partai politik tingkat provinsi</li> <li>- Instansi terkait</li> </ul>
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Aula Hotel Berkah, Jln Soekarno Hatta</p> <p>Waktu : Senin, 19 Agustus 2019</p>	<p>Tempat : Aula Hotel Berkah, Jln Soekarno Hatta</p> <p>Waktu : Senin, 19 Agustus 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas</li> </ul>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat</p>

		Pendukung dan Peserta Kegiatan	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.63.560.000,-APBD	Rp.60.663.600,- (95,44%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah partai politik yang telah diverifikasi, evaluasi dan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik, 1 kali pelaksanaan rapat dan 1 dokumen laporan yang tersusun selama setahun.	Jumlah partai politik yang telah diverifikasi, evaluasi dan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik, 1 kali pelaksanaan rapat dan 1 dokumen laporan yang tersusun selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

XI. Program : **Fasilitas Politik Dalam Negeri.**

2. Kegiatan : **Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruhan tubuh kenegaraan Republik Indonesia.	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Tujuan Kegiatan Rapat Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah Tahun Anggaran 2019 Provinsi Sulawesi Barat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui perkembangan politik di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat</li> <li>2. Mencegah masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pilkada dan isu-isu perkembangan politik lainnya</li> <li>3. Hasil rapat evaluasi dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penanganan perkembangan politik di Daerah.</li> </ol>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah Antara Lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pemantau</li> <li>- Tim Desk Pilkada Sulawesi Barat</li> <li>- Instansi terkait KPU Provinsi Sulawesi Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi, Satpol PP Prov. Sulawesi Barat, Kesbangpol se – Provinsi</li> </ul>	<p>Sasaran Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah Antara Lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pemantau</li> <li>- Tim Desk Pilkada Sulawesi Barat</li> <li>Instansi terkait KPU Provinsi Sulawesi Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi, Satpol PP Prov. Sulawesi Barat, Kesbangpol se – Provinsi</li> </ul>

		Sulawesi Barat, partai politik dan media cetak Elektronik.	Sulawesi Barat, partai politik dan media cetak Elektronik.
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat : Hotel Diana Jl. Emmy Selan Mamuju Waktu : Senin, 26 Agustus 2019	Tempat :Hotel Diana Jl. Emmy Selan Mamuju Waktu :Senin, 26 Agustus 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.358.348.000,-APBD	Rp.332.987.900,- (92,92%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 1 dokumen laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik didaerah selama setahun.	Jumlah 1 dokumen laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik didaerah selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

XI. Program : **Fasilitas Politik Dalam Negeri.**

3. Kegiatan : Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Sulbar.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Sulbar sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratis yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem - sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi politik nasional dewasa ini. Disamping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung oleh penyelenggara pemerintah yang professional dan terbebas dari praktik - praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di pusat dan di daerah.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi atau menjadi alat pembanding antar daerah dalam memperoleh gambaran perkembangan demokrasi pada tingkatan provinsi di seluruh Indonesia.</li> <li>- Perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.</li> <li>- Pemerintah, membantu dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik - evidence - based analysis untuk menentukann bidang sasaran yang spesifik untuk diintervensi.</li> <li>- Stakeholder, pembagunan non-pemerintah, mengawasi proses penyusunan dan implementasi perencanaan dalam kebijakan</li> </ul>	

		<p>pembangunan nasional dan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat provinsi dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan - perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Sulbar Antara Lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pokja IDI Sulawesi Barat.</li> <li>- Organisasi Perangkat Daerah Terkait.</li> <li>- Badan Kesbang Pol Se-Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Partai Politik.</li> <li>- Ormas.</li> <li>- Tokoh Masyarakat dan Pemuda.</li> <li>- Media Cetak dan Elektronik.</li> </ul>	<p>Sasaran kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Sulbar Antara Lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pokja IDI Sulawesi Barat.</li> <li>- Organisasi Perangkat Daerah Terkait.</li> <li>- Badan Kesbang Pol Se-Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Partai Politik.</li> <li>- Ormas.</li> <li>- Tokoh Masyarakat dan Pemuda.</li> <li>- Media Cetak dan Elektronik.</li> </ul>
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel Pantai Indah Jl. Badau 25 Samping Rumah Adat Rimuku Mamuju Sulbar</p> <p>Waktu : 04 Oktober 2019</p>	<p>Tempat : Hotel Pantai Indah Jl. Badau 25 Samping Rumah Adat Rimuku Mamuju Sulbar</p> <p>Waktu : 04 Oktober 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.179.982.000,-APBD	Rp.161.048.500,- (89,48%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 1 dokumen laporan terkait tentang Peningkatan demokrasi IDI terhadap 3 aspek yaitu : aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik & aspek lembaga demokrasi selama setahun.	Jumlah 1 dokumen laporan terkait tentang Peningkatan demokrasi IDI terhadap 3 aspek yaitu : aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik & aspek lembaga demokrasi selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

XII. **Program** : **Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan**

1. **Kegiatan** : Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan merupakan implementasi sebagai sumber dari segala hukum, nilai-nilai Pancasila harus menguasai dan melingkupi aturan hukum dasar dan semua peraturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.</p> <p>Ketika Bangsa Indonesia berkompromi dan berkonsensus untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara yang nilai-nilainya dijunjung tinggi, maka itu berarti Pancasila harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam mengatasi keanekaragaman dan kemajemukan dalam masyarakat Indonesia. Tentunya tidak bermaksud menghapuskan perbedaan, tetapi merangkul semuanya dalam semboyan khas Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.</p> <p>Nilai dan makna yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi pedoman dan panduan bagi seluruh warga Negara RI dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa. Nilai-Nilai kandungan Pancasila harus menjadi penuntun bagi bangsa dalam merumuskan dan menetapkan strategi serta pilihan cara yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pemahaman kepada peserta kegiatan tentang arti dan pentingnya fungsi dan kedudukan Pancasila dalam bernegara dan berbangsa.</li> <li>- Memberikan pemahaman kepada para peserta tentang nilai-nilai yang dikandung Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa.</li> </ul> <p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para peserta dapat mengerti dan memahami fungsi serta kedudukan Pancasila yang sangat penting dalam tata kenegaraan</li> </ul>	

		Republik Indonesia. - Para peserta sebagai warga Negara memiliki kesadaran dan tekad untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.	
3.	Sasaran	Sasaran Peserta yang hadir yaitu :Pengurus/Anggota FPK Sulawesi Barat, Organisasi Pemuda berbasis keagamaan, Unsur Pers dan Unsur Pemerintah setempat (Lurah).	40 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat : Marannu Golden Hotel, Mamuju Waktu : 16 Juli 2019	Tempat : Marannu Golden Hotel, Mamuju Waktu : 16 Juli 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.74.528.000,- APBD	Rp.74.436.000,- (99,88%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta memahami bahwa Pancasila adalah satu-satunya Ideologi yang paling tepat dan pantas dalam	Jumlah 40 pes Jumlah 40 peserta memahami bahwa Pancasila adalah satu-satunya Ideologi yang paling tepat dan pantas dalam

		kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun dengan 1 dokumen laporan.	kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun dengan 1 dokumen laporan.
8.	Permasalahan	Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan mengalami rasionalisasi anggaran tetapi tidak mengurangi daripada ouput yang akan dicapai pada tahun 2019.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

- XII. **Program** : **Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan**  
2. **Kegiatan** : Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbiq.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Dialog Lintas SARA Dalam memperkuat Komitmen kerukunan Bangsa untuk Sulawesi Barat Malaqbiq Negara Indonesia adalah Negara yang bersifat plural dalam berbagai hal, baik ras, suku, Bahasa daerah, adat istiadat dan agama. Kebaragaman ini sesungguhnya merupakan kekayaan bagaikan mozaik yang sangat indah dan berharga jika mampu dikelola dengan baik. Namun kekayaan keberagaman tersebut bisa menjadi ancaman yang menghancurkan jika tidak mampu dikelola secara baik dan cerdas sebagaimana yang terjadi di pertikaian berlatar SARA. Hal yang sama juga ditunjukkan dari beberapa Negara dulunya begitu besar, kuat dan digjaya namun harus tunjuk pada alur sejarahnya menjadi Negara-negara kecil terpisah-pisah, seperti Uni Soviet yang terpecah-pecah menjadi 15 negara. Semua itu adalah contoh dari ketidakmampuan Negara dan bangsa yang tidak cerdas memenage kekayaan keberagaman SARA yang mereka miliki.	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman warga Negara (Peserta) tentang pentingnya memelihara kerukunan antar warga. Sekaligus meningkatkan kesadaran warga (peserta) untuk terlibat aktif dalam upaya-upaya pemeliharaan / peningkatan kerukunan antar warga masyarakat demi terwujudnya Sulawesi Barat yang Malaqbi.</p> <p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbangunnya Kesadaran bersama tentang pentingnya dialog meskipun dengan latar SARA yang berbeda- beda.</li> <li>- Tertanam kesadaran dan cara pandang warga Negara (peserta) tentang pentingnya memelihara ke – Tunggal Ika-an dalam ke Bhinneka-an.</li> <li>- Terbangunnya pemahaman dan kesadaran dari semua peserta tentang pentingnya memperkuat komitmen kerukunan dalam</li> </ul>	

		<p>mencapai cita-cita bersama yakni daerah Sulawesi Barat yang maju dan melaqbi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tertanamnya kesadaran peserta untuk berpartisipasi aktif dalam memelihara keberagaman dalam semangat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran kegiatan Dialog Lintas Sara Dalam memperkuat Komitmen kerukunan Bangsa untuk Sulawesi Barat Malaqbiq Antara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur Tokoh dari berbagai agama yang berbeda - beda.</li> <li>- Unsur Tokoh pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan dan agama</li> <li>- Unsur Tokoh Masyarakat dari berbagai etnis dan suku bangsa.</li> <li>- Unsur jurnalis.</li> <li>- Ditambah unsur pemerintah daerah</li> </ul>	<p>100 Peserta untuk dua kali pelaksanaan kegiatan 50 Peserta Kabupaten Polewali Mandar dan 50 Peserta di Kabupaten Majene</p>
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel Lilianto Polewali Mandar Hotel Villa Bogor Leppe Majene</p> <p>Waktu : - 30 April 2019 - 13 Mei 2019</p>	<p>Tempat : Hotel Lilianto Polewali Mandar Hotel Villa Bogor Leppe Majene</p> <p>Waktu : - 30 April 2019 - 13 Mei 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan</li> </ul>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.</p>

		<p>penggandaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.198.902.000,- APBD	Rp.198.868.000,- (99,98%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta yang mengikuti kegiatan dialog lintas SARA dalam memperkuat komitmen kerukunan bangsa untuk Sulawesi Barat Malaqbiq, 1 kali pelaksanaan dan 1 dokumen laporan.	Jumlah 40 peserta yang mengikuti kegiatan dialog lintas SARA dalam memperkuat komitmen kerukunan bangsa untuk Sulawesi Barat Malaqbiq, 1 kali pelaksanaan dan 1 dokumen laporan.
8.	Permasalahan	Kegiatan Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbiq mengalami rasionalisasi anggaran tetapi tidak mengurangi daripada ouput yang akan dicapai pada tahun 2019.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

- XII. **Program** : **Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan**  
3. **Kegiatan** : Musyawarah Kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019-2024.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Musyawarah Kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019-2024 Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan tingkah sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Hasil pandangan tersebut akan membentuk watak warga Negara yang menyadari bahwa Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan adalah merupakan satu kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan system pertahanan dan keamanan, serta segala macam aspek kehidupan yang serba satu dalam bingkai NKRI. Sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 71 TAHUN 2021 diwajibkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah tersebut maka dituntut untuk melaksanakan upaya pengembangan pementapan wawasan kebangsaan melalui penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan di wilayah masing-masing.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksud                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penggantian personil pengurus PPWK Provinsi Sulawesi Barat Periode tahun 2014-2017</li> <li>b. Mensosialisasikan tugas dan fungsi PPWK kepada semua pihak yang terlibat dalam kelompok kerja tersebut</li> </ul> </li> <li>- Tujuan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Tujuan kegiatan ini sebagai upaya optimalisasi PPWK sebagai kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya</li> </ul> </li> </ul>	



		<p>sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI,</li> <li>b. Mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada indeks demokrasi Indonesia.</li> <li>c. Mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan local.</li> <li>d. Memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK.</li> <li>e. Memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan.</li> <li>f. Membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat local, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.</li> </ol>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Musyawarah Kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019-2024 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur Forkopimda</li> <li>- Tokoh Masyarakat,</li> <li>- Tokoh Agama</li> <li>- Tokoh Adat</li> <li>- Partai Politik</li> <li>- Akademis</li> <li>- Media Elektronik dan Media Cetak serta LSM</li> </ul>	40 Peserta

4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat : Maleo Town Square (Matos) Hotel & Convention Waktu : Senin, 09 Desember 2019	Tempat : Maleo Town Square (Matos) Hotel & Convention Waktu : Senin, 09 Desember 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 75.000.000,-APBD	Rp.74.946.800,- (99,93%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 pesertaMusyawarah Kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019-2024, 1 kali pelaksanaan rapat dan 1 dokumen laporan selama setahun.	Jumlah 40 peserta Musyawarah Kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019-2024, 1 kali pelaksanaan rapat dan 1 dokumen laporan selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

XII.Program :**Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.**

4. Kegiatan:Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten se – Sulawesi Barat.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum PembauranKebangsaan (FPK) Kabupaten se – Sulawesi Barat.	Indonesia merupakan sebuah bangsa yang sangat kaya akan sumber daya alam yang melimpah serta memiliki keragaman yang tersebar dan menghuni secara damai wilayah Nusantara tersebut merupakan cirri bangsa Indonesia dan juga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat penting untuk disyukuri oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk membangun kesedaran bahwa menjaga keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara adalah tugas bersama.Keberagaman suku, adat istiadat, budaya dan agama adalah karunia besar bagi bangsa ini jika keberagaman itu dapat dikelola dengan baik. Namun dapat juga menjadi sumber malapetaka bagi kelangsungan bangsa dan Negara Indonesia bila kebhinnekaan yang ada tidak dapat dikelola dengan cara-cara yang baik, efektif dan bijaksana. Pengelolaan keragaman tersebut harus dapat membangun kesadaran dan komitmen kuat dari setiap individu warga Negara, bahwa perbedaan tidak akan pernah menjadi bibit pertengkaran, bahwa perbedaan tidak akan pernah menjadi bibit pertengkaran, bahwa perbedaan adalah sebuah anugerah, bahwa keharmonisan dalam mendorong proses pencapaian cita-cita dari Negara besar ini.
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud kegiatan ini adalah melakukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi dan Kabupaten se – Sulawesi Barat dalam upaya meningkatkan toleransi dan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>• Tujuan Kegiatan ini adalah :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan dialog antar Pengurus FPK Provinsi dan Kabupaten Sulawesi Barat.</li> <li>2. Menampung dan mengakomodir Aspirasi Anggota / Pengurus FPK Se – Sulawesi Barat.</li> </ol> </li> </ul>	

		<p>3. Mendorong Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan agar lebih mengoptimalkan perannya dalam pembangunan, memelihara ketentraman Masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman Keutuhan Bangsa khususnya di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.</p> <p>4. Mengkoordinasikan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat di Wilayah Prov. Sulawesi Barat.</p>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten se - Sulawesi Barat adalah pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi dan Kabupaten se - Sulawesi Barat yang merupakan perwakilan dari setiap Suku / Ras yang Wilayah di Provinsi Sulawesi Barat.</p>	50 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Marannu Golden Hotel , Jl. Tuna Mamuju</p> <p>Waktu : Kamis 19 - 20 Desember 2019</p>	<p>Tempat : Marannu Golden Hotel , Jl. Tuna Mamuju</p> <p>Waktu : Kamis 19 - 20 Desember 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.75.000.000,- APBD	Rp.74.016.800,- (000%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 50 peserta yang mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten se – Sulawesi Barat, 1 kali pelaksanaan rapat dan 1 dokumen laporan selama setahun.	Jumlah 50 peserta yang mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten se – Sulawesi Barat, 1 kali pelaksanaan rapat dan 1 dokumen laporan selama setahun.
8.	Permasalahan	Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten se – Sulawesi Barat tersebut merupakan kegiatan yang terlaksana setelah dilakukan APBD Perubahan, kegiatan tersebut tercantum dalam RKA-P / DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

XIII. Program : **Program Pembinaan Karakter Bangsa.**

1. Kegiatan : **Pembentukan Kader Bela Negara Generasi Muda dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang		<p>Pembentukan Kader Bela Negara Generasi Muda dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah proses yang berat dan panjang yang dimulai dari keberadaan kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh nusantara. Setelah melalui berbagai tahapan dan tantangan sejarah, akhirnya tumbuh kesadaran baru dan tekad yang sama untuk membentuk satu negara kesatuan. Selanjutnya kesadaran serta kemauan membentuk suatu negara yang merdeka tersebut mencapai hasilnya dengan bergaungnya pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun babakan sejarah NKRI tercinta ini ternyata masih menghadapi cobaan yang tidak lebih mudah dalam mempertahankan keutuhannya sebagai sebuah bangsa. Ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI dari waktu ke waktu terus berkembang. Saat ini ancaman yang dihadapi tidak hanya bersifat konvensional saja atau fisik semata akan tetapi sudah berkembang pula ancaman yang berbentuk non fisik atau non militer. Bahkan ancaman lebih berkembang menjadi bersifat multidimensi karena karakternya dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.</p>
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan kader Bela Negara dimaksudkan untuk menanamkan kembali nilai-nilai dan sikap bela Negara serta rasa cinta tanah air bagi generasi muda yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>2. Menanamkan sikap rela berkorban bagi bangsa dan Negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 digenerasi muda (Peserta)</li> <li>3. Memperkuat rasa nasionalisme di kalangan generasi muda agar tidak terpengaruh paham atau ideologi dan yang berpotensi merusak NKRI yang disusupkan melalui isu-isu</li> </ol>	

		<p>bernuansa SARA dan disparitas pembangunan.</p> <p>Tujuan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk kader Bela Negara dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari komponen masyarakat terutama generasi muda.</li> <li>2. Para peserta sebagai kader bela Negara dapat memahami pengertian bela Negara.</li> <li>3. Para peserta memiliki kesadaran, tekad dan sikap serta perilaku dan tindakan Bela Negara yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas segala –galanya.</li> </ol>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran kegiatan Kader Bela Negara Generasi Muda dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Antara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Kesatuan bangsa dan Politik.</li> <li>- Satuan Polisi Pamong Praja.</li> <li>- Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</li> <li>- Tagana (Dinas Sosial)</li> </ul>	40 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Makorem 142 Tatag, Kabupaten Mamuju</p> <p>Waktu : 12 Maret s/d 14 Maret 2019</p>	<p>Tempat : Makorem 142 Tatag, Kabupaten Mamuju</p> <p>Waktu : 12 Maret s/d 14 Maret 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.143.770.400,- APBD	Rp.143.560.400,- (99,85%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta yang mengikuti kegiatan Kader Bela Negara Generasi Muda dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 1 kali pelaksanaan pembentukan bela negara, dan 1 dokumen laporan selama setahun.	Jumlah 40 peserta yang mengikuti kegiatan Kader Bela Negara Generasi Muda dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 1 kali pelaksanaan pembentukan bela negara, dan 1 dokumen laporan selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

Mamuju, 27 Februari 2020  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Sulawesi Barat

**Drs.H. MUHAMMAD RAHMAT, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023



**BAB VI.**

**PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH DAERAH**

**A. Kerjasama Antar Daerah**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

**B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

**C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

**D. Pembinaan Batas Wilayah**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

**E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana (BPBD)**

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Potensi Bencana Yang Diperkiraan Terjadi

**F. Pengelolaan Kawasan Khusus**

1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
2. Sumber Anggaran
3. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi.

### **G.Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KESBANGPOL dan SATPOL PP).**

#### **1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya).**

Penanganan konflik sosial yang dilakukan selama ini masih bersifat parsial dan belum komprehensif, sehingga mengakibatkan munculnya komplek berupa tindakan yang eksekutif terhadap pelaku, dugaan pelanggaran HAM, dan bahkan ada penilaian ragu-ragu, tidak mampu, serta seolah-olah ada kesan terjadi pembiaran.

#### **2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

- Kabinda Provinsi Sulawesi Barat.
- Kakesbang Pol se- Sulawesi Barat.
- Kapolres se- Sulawesi Barat.
- Pasi Intel Kodim se-Sulawesi Barat.
- Kasat Intel Polres se-Sulawesi Barat.
- Anggota Bais TNI.
- Ketua KPU dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Anggota Kominda Provinsi Sulawesi Barat.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
- Kasatpol Satpol PP se-Sulawesi Barat.
- Kavid. Keimigrasian Provinsi Sulawesi Barat.
- Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.
- Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
- Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Barat.
- Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat.
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- FKUB Provinsi Sulawesi Barat.
- FKDM Provinsi Sulawesi Barat.
- Danpos Al.
- Kapolsek Tommo.
- Kapolsek Budong – Budong.
- Kapolsek Pangale.
- Kapolsek Mamuju.
- Posda BIN Kab.Mamasa, Polman, & Majene.

- Kasiei Intel Kab. Mamasa, Polman & Majene.
- Pasie OPS Dandim Kab. Mamasa, Polman & Majene.
- Pasie Intel Dandim Kab. Mamasa, Polman & Majene.

**3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan.**

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Tingkat Pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SMA	6	
2.	SARJANA MUDA	4	
3.	STRATA 1 (S.1)	20	
4.	STRATA 2 (S.2)	8	
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Tingkat Golongan :

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	5	
2.	III	27	
3.	II	6	
4.	I	0	
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Eselon & Struktur Organisasi :

a.	Eselon II	=	1 Orang
b.	Eselon III	=	3 Orang
c.	Eselon IV	=	8 Orang
d.	Staf	=	26 Orang
<b>Jumlah</b>		=	<b>38 Orang</b>

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenjang Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Struktural :

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim Tk.I	0	
2.	Diklatpim Tk.II	1	
3.	Diklatpim Tk.III	6	
4.	Diklatpim Tk.IV	5	
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenis Kelamin :

1. Laki-Laki	: 26Orang
2. Perempuan	: 12 Orang

Jumlah : 38

#### 4. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendapat alokasi anggaran dari dana APBD Provinsi Sulawesi Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp.4.802.000.000,-** telah perubahan sebesar **Rp.4.868.480.360,-** yang terealisasi sebesar **Rp.4.649.968.603,-** atau **95,51%**.

#### 5. Penanggulangan dan Kendalanya.

- Dibentuknya koordinasi Forum Dialog Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
- Terbentuknya rapat koordinasi gangguan keamanan dalam negeri (Sosialisasi Sistem Pencegahan Dini Implementasi Inpres No. 2 tahun 2013 Junto Inpres No 1 Tahun tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
- Terbentuknya rapat koordinasi dan evaluasi Pencegahan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2019.

#### 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.

- Adanya kesepakatan dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Polman dan Majene terkait penyusunan rencana aksi terpadu TA.2019.
- Menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta instansi dan unsur terkait lainnya beserta jajarannya dalam upaya terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif aman dan damai.
- Terwujudnya ketertiban dan kemandirian dengan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak dengan menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi

konflik, gejala atau dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini

- Terbangunnya deteksi dini dan mengatasi potensi bencana baik bencana alam, serta meningkatkan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa dan mencegah timbulnya konflik sosial dan sebagainya.

Mamuju, 27 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Sulawesi Barat

**Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6), pada Bab VII diatur pada Ketentuan Peralihan Pasal 9 menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2013 yaitu membantu Gubernur dalam menjaga



keamanan dan kenyamanan lingkungan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri 11 tahun 2019, merupakan Penjabaran dari Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga dapat memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik khususnya kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja. Maka dari itu pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kesbangpol yang masih berbentuk kantor menjadi badan dengan berlandaskan Pasal 20 Permendagri No 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Mengacu pada peraturan pelaksana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Maka dari itu, Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara yang diwajibkan untuk menetapkan hasil evaluasi

pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dicapai selama setahun dan menyampaikannya dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).LKPJ merupakan mengimplementasikan keterangan pencapaian pertanggungjawaban.Penyusunan LKPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah melalui Kepala Badan.

## II. Dasar Hukum

Landasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun

- 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010.

### **III. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan LKPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publikatas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi.

#### **b. Tujuan**

Penyusunan LKPJ adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKPJ ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi Sulawesi Barat.

#### IV. Visi dan Misi

##### ❖ Visi

Sebagai unit operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kesatuan Bangsa dan Politik serta yang ditetapkan Gubernur sesuai dengan Draft Rancangan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Sejalan dengan perkembangan pertumbuhan penduduk, keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan dinamika nilai-nilai sosial budaya serta etika politik yang stabil terhadap Sumber Daya Manusia yang tidak seimbang dan penggunaan teknologi begitu cepat di era reformasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mampu, dan mau berperan aktif lebih baik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif dan efisien serta mendukung penciptaan stabilitas politik serta pemerintahan dalam Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam menjawab tantangan dimaksud, diperlukan adanya kesadaran diri dan kemauan yang kuat untuk mengubah diri dalam perilaku, manusia yang kurang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan kebangsaan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

yang jelas, dan dapat menjadi landasan operasional organisasi serta mendukung kebijakan nasional dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat adalah :

**“Terwujudnya Stabilitas Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Dinamika Nilai-Nilai Sosial Budaya serta Etika Politik yang Maju dan Malaqbiq”**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja unit selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun dalam penentuan Visi perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut :

- Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ;
- Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat ;
- Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami ;
- Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat ; dan
- Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian.

❖ **Misi**

Berdasarkan tupoksi SKPD yang ada pada bagian 2.1. maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat akan mendukung pelaksanaan misi ke satu (1) dan ke dua (2) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

**“(1) Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya ; dan (2) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya”**

Organisasi yang dibentuk selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, guna mempertahankan keberadaannya ditetapkan Misi yang merupakan pernyataan tentang tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai organisasi yang bersangkutan. Misi yang ditetapkan ini menjadi tuntutan bagi manajemen dalam menjalankan roda organisasinya.

Penetapan Misi merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan guna mengarahkan kegiatan operasional organisasi menuju sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui strategis yang telah dipilih.

Mengacu pada Visi yang ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menjabarkan ke dalam tujuan dan sasaran organisasi yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen.

Pernyataan Misi organisais tersebut mengandung makna :

- ❖ Pernyataan tentang aktivitas organisasi yang ingin dicapai ;
- ❖ Citra organisasi yang diinginkan diwujudkan agar dikenal oleh berbagai pihak;

❖ Pandangan organisasi tentang keberadaan profesinya sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah merumuskan Misi Organisasi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan paham akan pentingnya nilai-nilai sosial budaya dan etika politik.**
- 2. Meningkatkan etika politik yang stabil pada ORMAS dan organisasi lainnya yang berkualitas.**
- 3. Menciptakan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat dengan budaya yang berbeda-beda.**
- 4. Meningkatkan stabilitas politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.**
- 5. Meningkatkan fasilitas dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.**
- 6. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam 4 Pilar Kebangsaan (UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun dalam penentuan Misi perlu untuk mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut :

- Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beberapa periode tertentu ;
- Misi harus dapat menggambarkan penjabarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di atasnya serta tugas-tugas yang dibebankan oleh Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;

- Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi operasional.



**BAB II**  
**PENJABARAN APBD**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2019 didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat yang diterima dan direalisasikan adalah sebagai berikut :

APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat sebelum perubahan dengan total pagu anggaran belanja sebesar Rp.8.892.101.759,92,- yang terdiri dari pagu Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.4.090.101.759,92,- dan pagu Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 4.802.000.000,00,- mengalami rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 298.470.364,66,- (3,36%) dari total pagu belanja. Sehingga pada akhir tahun anggaran APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat berubah pada total pagu anggaran belanja sebesar Rp. 8.593.631.395,26,- yang terdiri dari pagu Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.3.725.151.035,00,- dengan Realisasi sebesar Rp.3.655.333.213,00,- (98,13%) dan sisa pagu anggaran sebesar Rp.69.817.782,00,-. Dan untuk pagu Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.4.868.480.360,26,- dengan Realisasi sebesar Rp.4.649.968.603,00,- (95,51%) dan sisa pagu anggaran sebesar Rp.218.511.757,00,-.

### **BAB III**

#### **HASIL PENYELENGGARAAN UMUM PEMERINTAHAN**

##### **A. Kerjasama Antar Daerah**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

##### **B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

##### **C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

##### **D. Pembinaan Batas Wilayah**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

##### **E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana (BPBD)**

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Potensi Bencana Yang Diperkiraan Terjadi

#### **F. Pengelolaan Kawasan Khusus**

1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
2. Sumber Anggaran
3. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi.

#### **G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KESBANGPOL dan SATPOL PP).**

##### **1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya).**

Penanganan konflik sosial yang dilakukan selama ini masih bersifat parsial dan belum komprehensif, sehingga mengakibatkan munculnya komplek berupa tindakan yang eksekutif terhadap pelaku, dugaan pelanggaran HAM, dan bahkan ada penilaian ragu-ragu, tidak mampu, serta seolah-olah ada kesan terjadi pembiaran.

##### **2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

- Kabinda Provinsi Sulawesi Barat.
- Kakesbang Pol se- Sulawesi Barat.
- Kapolres se- Sulawesi Barat.
- Pasi Intel Kodim se-Sulawesi Barat.
- Kasat Intel Polres se-Sulawesi Barat.
- Anggota Bais TNI.
- Ketua KPU dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Anggota Kominda Provinsi Sulawesi Barat.

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
- Kasatpol Satpol PP se-Sulawesi Barat.
- Kavid. Keimigrasian Provinsi Sulawesi Barat.
- Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.
- Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
- Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Barat.
- Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat.
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- FKUB Provinsi Sulawesi Barat.
- FKDM Provinsi Sulawesi Barat.
- Danpos Al.
- Kapolsek Tommo.
- Kapolsek Budong – Budong.
- Kapolsek Pangale.
- Kapolsek Mamuju.
- Posda BIN Kab.Mamasa, Polman, & Majene.
- Kasiei Intel Kab. Mamasa, Polman & Majene.
- Pasie OPS Dandim Kab. Mamasa, Polman & Majene.
- Pasie Intel Dandim Kab. Mamasa, Polman & Majene.

### **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan.**

➤ Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

Menurut Tingkat Pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SMA	6	
2.	SARJANA MUDA	4	
3.	STRATA 1 (S.1)	20	
4.	STRATA 2 (S.2)	8	
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	

➤ Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Tingkat Golongan :

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	5	
2.	III	27	
3.	II	6	
4.	I	0	
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	

➤ Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Eselon & Struktur Organisasi :

- a. Eselon II = 1 Orang
- b. Eselon III = 3 Orang
- c. Eselon IV = 8 Orang
- d. Staf = 26 Orang

**Jumlah 38 Orang**

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenjang Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Struktural :

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim Tk.I	0	
2.	Diklatpim Tk.II	1	
3.	Diklatpim Tk.III	6	
4.	Diklatpim Tk.IV	5	
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenis Kelamin :

1. Laki-Laki : 26 Orang
2. Perempuan : 12 Orang

Jumlah : 38

#### 4. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendapat alokasi anggaran dari dana APBD Provinsi Sulawesi Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp.4.802.000.000,-** telah perubahan sebesar **Rp.4.868.480.360,-** yang terealisasi sebesar **Rp.4.649.968.603,-** atau **95,51%.**

**5. Penanggulangan dan Kendalanya.**

- Dibentuknya koordinasi Forum Dialog Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
- Terbentuknya rapat koordinasi gangguan keamanan dalam negeri (Sosialisasi Sistem Pencegahan Dini Implementasi Inpres No. 2 tahun 2013 Junto Inpres No 1 Tahun tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri).
- Terbentuknya rapat koordinasi dan evaluasi Pencegahan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2019.

**6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.**

- Adanya kesepakatan dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Polman dan Majene terkait penyusunan rencana aksi terpadu TA.2019.
- Menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta instansi dan unsur terkait lainnya beserta jajarannya dalam upaya terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif aman dan damai.
- Terwujudnya ketertiban dan kemandirian dengan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak dengan menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi konflik, gejala atau dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini

- Terbangunnya deteksi dini dan mengatasi potensi bencana baik bencana alam, serta meningkatkan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa dan mencegah timbulnya konflik sosial dan sebagainya.



**BAB IV.**

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN  
TUGAS PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN**

SKPD : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Belanja Langsung : **Rp. 4.868.480.360.26,-**

Realisasi Keuangan BL : **Rp. 4.649.968.603.00,- (95,51%)**

Realisasi Fisik (%) : **100%**

Sisa Pagu Anggaran : **Rp. 288.329.539.26,-**

**A. Belanja Rutin**

I. Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

1. Kegiatan : **Penyediaan Jasa Surat Menyurat.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan tentang pengiriman jasa persuratan yang dilakukan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Kantor Pos maupun melalui Biro / Jasa Pengiriman Surat / Barang Lainnya, serta penyediaan materai dan pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 35orang.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas mutu administrasi kantor lewat media surat menyurat.</li> <li>- Tujuan : Adanya 11.110Surat Masuk dan Keluar.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya data-data pengiriman surat administrasi kantor yang akurat.	Surat, Materai dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT).
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan.	Tempat: Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya,	- Belanja Materai 6000 dan 3000	- Kantor Pos dan Giro - Kantor Badan Kesatuan Bangsa

	Peralatan / Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci).		dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.420.390.000,- APBD	Rp408.390.000,- (97,15%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah materai 6000 & 3000 yang terbelikan dan Jumlah gaji PTT yang terbayarkan selama 12 Bulan.	Jumlah materai 6000 & 3000 yang terbelikan dan Jumlah gaji PTT yang terbayarkan selama 12 Bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	Lebih ditingkatkannya kualitas proses pengiriman surat menyuratnya.	

I. Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan rutin untuk pemenuhan kebutuhan akan sumber daya air dan listrik dalam upaya mendukung proses kerja sehingga dapat menunjang kelancaran administrasi kantor dengan selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud : Meningkatkan kualitas mutu administrasi kantor lewat media via telepon dan via email. Tujuan : Adanya jaringan telepon, fax dan via email.	
3.	Sasaran	Terjalannya kelancaran hubungan komunikasi dengan baik.	Pelayanan telepon, fax dan via email kantor selama setahun.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2019.	Tempat: Badan Kesbang Pol. Tanggal: Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Materai	PT. Telkom Cabang Mamuju.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.14.028.000,- APBD	Rp.12.273.428,-(87,49%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah pembayaran jasa telpon, air dan listrik selama 12 Bulan.	Jumlah pembayaran jasa telpon, air dan listrik selama 12 Bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih ditingkatkannya hubungan komunikasi antar instansi terkait</li> <li>- Alokasi anggarannya berlebihan.</li> </ul>	

I. Program : **Program Pelayanan Administasi Perkantoran.**

3. Kegiatan : **Penyediaan Alat Tulis Kantor.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor merupakan kegiatan rutin yang sangat menunjang kelancaran administrasi kantor dengan baik selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas mutu alat tulis kantor dan menjamin kelancaran administrasi kantor.</li> <li>- Adanya alat tulis kantor.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya kebutuhan alat tulis kantor dengan baik.	21 Macam alat tulis kantor.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol.Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol.Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan ( Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK berupa Amplop Ero,Amplop Kijang, Kertas Folio,Kertas Kwarto, Ncr, Tinta, Map, Penjepit Hekter, Peluru Hekter, Catridge, Buku Agenda, Ballpoint</li> </ul>	Noor Berkah
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.44.495.500,- APBD	Rp.43.836.900,- (98.52%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 22 jenis alat tulis kantor yang terpakai selama 12 Bulan.	Jumlah 22 jenis alat tulis kantor yang terpakai selama 12 Bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran/Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih melengkapi dan menambah alat tulis kantor demi kelancaran pekerjaan.</li> <li>- Perlunya mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk urusan kelengkapan alat tulis kantor.</li> </ul>	

I. Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

4. Kegiatan : **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran administrasi kantor selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas mutu barang-barang yang dicetak dan penggandaan.</li> <li>- Adanya barang-barang yang dicetak dan penggandaan dikantor.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya barang - barang cetakan dan penggandaan.	Cetak SPPD lembar depan, SPPD lembar belakang, blangko serta fotocopy.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Bahan cetak spanduk dan baliho serta fotocopy.	Noor Berkah
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.34.692.000,- APBD	Rp.34.672.600,- (99,94%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah lembar depan dan belakang SPPD serta Jumlah SPM yang tercetak selama 12 Bulan.	Jumlah lembar depan dan belakang SPPD serta Jumlah SPM yang tercetak selama 12 Bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran/Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih melengkapi dan menambah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan demi kelancaran pekerjaan.</li> <li>- Perlunya mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan untuk urusan kelengkapan barang cetakan dan penggandaan.</li> </ul>	

I. Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

5. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran administrasi kantor selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas mutu administrasi kantor lewat media bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.</li> <li>- Adanya administrasi kantor lewat media bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya beberapa bahan bacaan dan beberapa peraturan perundang-undangan.	Surat kabar / majalah dan Iklan Pemerintah / Ucapan selamat.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatannya / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	Belanja jasa kantor berupa Advetorial	Adanya Advetorial
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.24.000.000,- APBD	Rp.24.000.000,- (100%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 10 kali bahan bacaan, majalah koran dan ucapan selamat yang terbayarkan selama 12 Bulan.	Jumlah 10 kali bahan bacaan, majalah koran dan ucapan selamat yang terbayarkan selama 12 Bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya memperhatikan pengalokasikan penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

I. Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

6. Kegiatan : **Penyediaan Makanan dan Minuman.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini hanya diperuntukkan untuk belanja makan dan minum rapat dan tamu selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan dan menjamin pemenuhan kebutuhan akan makan dan minum rapat dan tamu.</li> <li>- Adanya pemenuhan kebutuhan makan dan minum rapat dan tamu.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Terpenuhinya kebutuhan akan makan dan minum pegawai dengan baik selama 1 tahun.	1.272 Kotak Makan minum rapat dan tamu kantor.
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/ d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu.	Kios Dani Mamuju.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.35.400.000,- APBD	Rp.35.390.000,- (99,97%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 1.227 kotak makan dan minum rapat, tamu serta pegawai selama 12 Bulan.	Jumlah 1.227 kotak makan dan minum rapat, tamu serta pegawai selama 12 Bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya memperhatikan pengalokasikan penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

7. Kegiatan :Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi kegiatan kantor khususnya dalam hal koordinasi dan konsultasi kepada instansi terkait yang ada di pusat dan di provinsi selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menciptakan kelancaran oleh karena adanya koordinasi dan konsultasi di beberapa instansi terkait yang ada di Provinsi dan sekitarnya.</li> <li>- Adanya koordinasi dan konsultasi di beberapa instansi terkait yang ada di Provinsi dan sekitarnya.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya laporan hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan instansi yang lainnya.	Adanya SPPD dan Laporan perjalanan dinas di Provinsi dan sekitarnya.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Kertas NCR dan ATK	Kunjungan kerja ke Makassar dan Jakarta.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.240.000.000,- APBD	Rp.239.766.369,- (99,90%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 32 kali SPPD dan laporan perjalanan dinas Luar Daerah selama setahun.	Jumlah 32 kali SPPD dan laporan perjalanan dinas Luar Daerah selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	



9.	Saran / Tindaklanjut	- Perlunya digunakan dengan baik anggaran perjalanan dinas ke luar daerah yang diberikan.
----	----------------------	---

I. Program : **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

8. Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi kantor khususnya dalam hal koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait yang ada di 6 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menciptakan kelancaran oleh karena adanya koordinasi dan konsultasi di beberapa instansi terkait yang ada di Kabupaten / Kota dan sekitarnya.</li> <li>- Adanya koordinasi dan konsultasi di beberapa instansi terkait yang ada di Kabupaten / Kota dan sekitarnya.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya laporan hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dengan instansi yang lainnya.	Adanya SPPD dan Laporan perjalanan dinas di beberapa Kabupaten / Kota dan sekitarnya.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Beberapa instansi yang ada di 6 kabupaten. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat: Beberapa instansi yang ada di 6 kabupaten. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli).	- Belanja Kertas NCR dan ATK	Kunjungan kerja ke beberapa kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, Mamuju Tengah, Majene, Mamasa dan Polman.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.311.700.341,- APBD	Rp.311.315.500,- (99,88%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 68 kali SPPD dan laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah di 5 Kabupaten selama setahun.	Jumlah 68 kali SPPD dan laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah di 5 Kabupaten selama setahun.

8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.
9.	Saran / Tindaklanjut	- Perlunya digunakan dengan baik anggaran perjalanan dinas ke dalam daerah yang diberikan.

II. Program : **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

1. Kegiatan : **Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan ini merupakan kegiatan yang khusus diadakan untuk kelengkapan peralatan gedung kantor.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana peralatan gedung kantor.</li> <li>- Adanya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya barang berupa Printer, Lemari Arsip Sliding Door dan CCTV	Adanya barang berupa Lemari Arsip Sliding Door dan CCTV
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 23 April s/d 20 Mei 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 23 April s/d 20 Mei 2019
5.	Keperluan Bahan ( Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Honor Tim PNS Pengadaan, Penerima dan Pemeriksa</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Fotocopy dan Jilid</li> </ul>	Toko Devin Elektronik
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.48.425.000,- APBD	Rp.45.305.000,- (93,56%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 4 jenis pengadaan peralatan gedung kantor berupa Printer, Lemari Arsip Sliding Door, dan CCTV dalam setahun.	Jumlah 4 jenis pengadaan peralatan gedung kantor berupa Printer, Lemari Arsip Sliding Door, dan CCTV dalam setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya digunakan dengan alokasi anggaran pengadaan pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

II. Program : **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

2. Kegiatan : **Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaraan aktivitas Kepala Badan dalam hal pemeliharaan rutin mobil jabatan.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas mutu pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan demi kelancaran aktivitas Kepala Badan.</li> <li>- Adanya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan demi kelancaran aktivitas Kepala Badan.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Adanya pemeliharaan- pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan.	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan sebanyak 1 unit.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol.  Tanggal : Januari s/d Desember 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol.  Tanggal : Januari s/d Desember 2019
5.	Keperluan Bahan ( Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Jasa Kantor (Gaji Sopir)</li> <li>- Belanja Jasa Servis</li> <li>- Belanja Jasa Penggantian Suku Cadang.</li> <li>- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Oli serta STNK.</li> </ul>	Bekerjasama dengan beberapa bengkel yang ada di Mamuju.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.72.100.000,- APBD	Rp.64.472.000,- (89,42%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah pemeliharaan BBM, Suku Cadang dan STNK Mobil serta Gaji Sopir Eselon II selama 12 bulan.	Jumlah pemeliharaan BBM, Suku Cadang dan STNK Mobil serta Gaji Sopir Eselon II selama 12 bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya digunakan dengan alokasi anggaran pengadaan pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

II. Program : **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran pelayanan aparatur.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas mutu pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional untuk mendukung kelancaran aktivitas perkantoran.</li> <li>- Adanya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua yaitu pembelian bahan bakar kendaraan roda empat dan roda dua, penggantian oli mesin kendaraan roda empat dan roda dua, servis kendaraan roda empat dan roda dua, pembiayaan pajak kendaraan, dan penggantian suku cadang kendaraan roda empat dan roda dua.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional untuk 3 unit mobil 18 unit motor dan 18 unit penggantian STNK.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Penggantian Suku Cadang untuk 18 Unit Roda Dua dan 3 Unit Roda Empat.</li> <li>- Belanja Bakar Minyak, Gas dan Oli untuk 18 Unit Roda Dua dan 3 Unit Roda Empat.</li> <li>- Belanja STNK untuk 18 Unit Roda Dua dan 3 Unit Roda Empat.</li> </ul>	Depot Pertamina Mamuju untuk pembelian BBM dan beberapa bengkel untuk pengadaan suku cadang dan pemeliharaan suku cadang.

6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.134.500.000,- APBD	Rp.104.073.650,- (77,38%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah pemeliharaan 18 unit motor dan 3 unit mobil operasional selama 12 bulan.	Jumlah pemeliharaan 18 unit motor dan 3 unit mobil operasional selama 12 bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak lanjut	- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.	

II. Program : **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

4. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor merupakan kegiatan rutin untuk menunjang kelancaran pelayanan aparatur dalam hal peralatan kantor.	
2.	Maksud dan Tujuan	Diadakan untuk pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor dengan tujuan demi peralatan kantor dalam keadaan baik dan demi kelancaran aktivitas dikantor.	
3.	Sasaran	Service peralatan dan perlengkapan kantor.	Servis komputer, servis notebook, servis printer, servis AC
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019
5.	Keperluan Bahan ( Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci)	- Belanja Materai - Belanja Jasa Servis Komputer, Notebook, Printer dan AC	Cahaya Komputer; Ganjil Komputer & Starcom
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.24.000.000,- APBD	Rp.23.660.000,- (98,58%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan.	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor selama 12 bulan.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.	



III. Program : **Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

1. Kegiatan : **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya khusus diadakan untuk kelancaran aktivitas dan keseragaman pegawai.	
2.	Maksud dan Tujuan	Diadakan untuk pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk keseragaman pegawai dan untuk menunjang aktivitas pegawai.	
3.	Sasaran	Adanya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa Pakaian Olah Raga 77Stel dan Baju Sutera Mandar 77 Stel	Adanya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa Pakaian Olah Raga 77Stel dan Baju Sutera Mandar 77 Stel
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 23 April 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 5 Agustus 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara ahli).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Honor Tim PNS Pengadaan, Penerima dan Pemeriksa</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Fotocopy dan Jilid</li> </ul>	CV.BJ. Monika
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.98.294.350,- APBD	Rp.97.162.450,- (98.85%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 77 stel pakaian dinas yang telah tersedia selama setahun.	Jumlah 77 stel pakaian dinas yang telah tersedia selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

IV. Program: **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal merupakan kegiatan rutin dan prioritas di sekretariat guna meningkatkan mutu dan kualitas SDM dalam hal ini keahlian dan keterampilan aparatur khususnya sesuai dengan tingkatan Eselon IV dan Eselon III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas SDM dalam hal ini keahlian dan keterampilan aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li> <li>- Adanya bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas SDM.</li> </ul>	
3.	Sasaran	5 Orang	Adanya 5 Orang pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis dan mengikuti Sosialisasi
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat dan Tanggal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalimantan, Hotel Aston Resisence Jl. Jendral Sudirman No.7 Kalandasa Ilir Balikpapan Kalimantan Timur. Tgl 20 Februari 2019</li> <li>- Jakarta, Hotel Aston Rasuna Jakarta (Tower A-Lower Ground) Kompleks Apartemen Taman Rasuna Jln. Ilir Rasuna Said Jakarta Tgl 04 s/d 07Maret 2019</li> <li>- Makassar, Claro Jl. Andi PATTARANI Makassar No.3 Tgl 30 Juni s/d 02 Juli 2019</li> <li>- Makassar, d'Maleo Hotel</li> </ul>	<p>Tempat dan Tanggal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalimantan, Hotel Aston Resisence Jl. Jendral Sudirman No.7 Kalandasa Ilir Balikpapan Kalimantan Timur. Tgl 20 Februari 2019</li> <li>- Jakarta, Hotel Aston Rasuna Jakarta (Tower A-Lower Ground) Kompleks Apartemen Taman Rasuna Jln. Ilir Rasuna Said Jakarta Tgl 04 s/d 07Maret 2019</li> <li>- Makassar, Claro Jl. Andi PATTARANI Makassar No.3 Tgl 30 Juni s/d 02 Juli 2019</li> <li>- Makassar, d'Maleo Hotel</li> </ul>

		Makassar Jl. Pelita Raya Tgl.	Makassar Jl. Pelita Raya Tgl.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Fotocopy dan Jilid</li> </ul>	Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis dan mengikuti Sosialisasi
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.33.300.000,- APBD	Rp.18.500.000,- (55,56%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 5 PNS yang mengikuti Bimtek selama setahun.	Jumlah 5 PNS yang mengikuti Bimtek selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

IV. Program : **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

2. Kegiatan : Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan, peningkatan peran dan fungsi kesatuan bangsa dan politik pada Provinsi Sulawesi Barat, yakni mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat secara menyeluruh di Provinsi Sulawesi Barat.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksud diadakannya kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat secara berdaya guna dan berhasil guna.</li> <li>- Tujuan diadakannya kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah adalah melakukan penilaian atas eksentitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah – langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur serta menentukan system dan tatacara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah.	50 Peserta
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : - Lt.III Ruang Oval Gubernur Sulawesi Barat - Auditorium Lt. IV. Kantor Gubernur Sulawesi Barat Tanggal : - Jumat, 22 Maret 2019 - Jumat 22 November 2019	Tempat : Lt.III Ruang Oval Gubernur Sulawesi Barat - Auditorium Lt. IV. Kantor Gubernur Sulawesi Barat Tanggal : - Jumat 22 Maret 2019 - Jumat 22 November 2019

5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Honorarium PNS</li> <li>- Belanja ATK berupa Seminar Kit, Materai, Spanduk , Dokumentasi</li> <li>- Belanja Honorarium Non PNS</li> <li>- Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Akomodasi Peserta</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Tenaga Ahli, Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, MC dan Dirigen</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 310.460.000,- APBD	Rp.266.029.000,- (85,69%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 50 peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah dan 4 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 50 peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah dan 3 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Ada satu kali pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik sebagaimana mestinya dikarenakan oleh jadwal permintaan pelaksanaan kegiatan terlambat dan waktu sudah dipenghujung akhir tahun.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya koordinasi terlebih dahulu dengan tim harian terkait untuk jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

IV. Program : **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

3.Kegiatan : Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se –Provinsi Sulawesi Barat.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se- Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan dan perencanaan pembangunan daerah, serta peningkatan peran dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat baik di Provinsi maupun di Kabupaten se – Provinsi Sulawesi Barat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan, pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah sesuai dinamika pembangunan demi untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat secara menyeluruh di Provinsi Sulawesi Barat, hal ini dapat dicapai tentunya dengan adanya sinkronisasi dan sinergitas program kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten Badan Kesbangpol. se – Provinsi Sulawesi Barat.	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <p>Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat untuk mensinkronisasikan Program dan Kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten yang terlaksana pada Tahun Anggaran 2019, Sehingga hasil yang diperoleh dapat menentukan seberapa besar laporan realisasi fisik dan keuangan serta kebijakan yang akan datang.</p> <p>Tujuan</p> <p>Adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman yang sama dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan peran dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya kegiatan rapat kerja teknis dan	Sasaran kegiatan ini ditujukan kepada para Kepala Badan

		sinkronisasi program kegiatan badan kesatuan bangsa dan politik se-Provinsi Sulawesi Barat.	Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris Badan dan yang membidangi Sub. Bagian Program dan Pelaporan baik di Provinsi maupun di Kabupaten.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Hotel Diana, Jl. Emmy Saelan No.27 Mamuju Tanggal : 23 Juli 2019	Tempat : Hotel Diana, Jl. Emmy Saelan No.27 Mamuju Tanggal : 23 Juli 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat Tulis Kantor berupa seminar kit</li> <li>- Belanja Materi</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transport</li> <li>- Belanja Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Akomodasi Peserta</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Tenaga Ahli, Narasumber, Moderator, Pembaca Doa, MC dan Dirigen</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 52.271.650,- APBD	Rp.51.970.000,- (99,42%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 30 peserta yang mengikuti Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 1 kali pelaksanaan rapat.	Jumlah 30 peserta yang mengikuti Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 1 kali pelaksanaan rapat.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya mensinkronisasikan program kegiatan yang ada di Kabupaten dan di Provinsi</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

V. Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran merupakan upaya untuk mengetahui capaian realisasi fisik maupun keuangan pada tiap semesteran, maka diperlukan suatu bentuk laporan semesteran yang menggambarkan perkembangan / capaian secara fisik maupun keuangan yang telah dilaksanakan per-semester.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk menggambarkan perkembangan / capaian secara fisik maupun keuangan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan per-semesteran.</li> <li>- Adanya laporan fisik dan keuangan semesteran.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran.	Adanya laporan keuangan semesteran.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 30 September 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 30 September 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Honor Non PNS</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sulbar
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.10.500.000,- APBD	Rp.10.500.000,- (100%).
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 1 dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun selama setahun.	Jumlah 1 dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	



V. Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

2. Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun merupakan upaya untuk mengetahui perkembangan fisik dan keuangan akhir tahun yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun, maka diperlukan suatu bentuk laporan keuangan yang terangkum dalam bentuk laporan keuangan akhir tahun yaitu Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan sehingga akhirnya hasilnya dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.</li> <li>- Adanya laporan keuangan akhir tahun.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Adanya 1 (satu) dokumen laporan keuangan akhir tahun.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 23 Desember 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 23 Desember 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan / suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Honor Non PNS</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.10.000.000,- APBD	Rp.9.810.000,- (98,10%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 1 dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun selama setahun.	Jumlah 1 dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

V. Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

3. Kegiatan : Penyusunan RKA / DPA – SKPD.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Penyusunan RKA / DPA – SKPD merupakan guna untuk tercapainya perencanaan program kegiatan tahun anggaran berikutnya, maka kegiatan penyusunan RKA Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 perlu dilaksanakan.	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk tercapainya program kegiatan dan penyusunan RKA / DPA Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li> <li>- Adanya penyusunan dokumen RKA / DPA Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya penyusunan RKA / DPA Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Adanya 2 Dokumen RKA / DPA Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : Januari s/d Desember 2019.
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Honor Non PNS</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.12.500.000,- APBD	Rp.12.482.000,- (99,86%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 2 dokumen penganggaran RKA / DPA - SKPD yang tersusun selama setahun.	Jumlah 2 dokumen penganggaran RKA / DPA - SKPD yang tersusun selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

V. Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

4. Kegiatan: Penyusunan RKA – P / DPPA – SKPD.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Penyusunan RKA-P / DPPA- SKPD merupakan penyempurnaan dari program kegiatan Tahun Anggaran 2018 dilakukan melalui penyusunan program anggaran perubahan.	
2.	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mewujudkan penyempurnaan dari program kegiatan Tahun Anggaran 2019 dilakukan melalui penyusunan program anggaran perubahan.</li> <li>- Adanya penyusunan dokumen RKA – P / DPPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya penyusunan RKA – P / DPPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Ada 12 Dokumen RKA – P / DPPA – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 30 Oktober 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 30 Oktober 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Honor Non PNS</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.12.500.000,- APBD	Rp. 12.500.000,- (100%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 2 dokumen penganggaran perubahan RKA-P / DPPA - SKPD yang tersusun selama setahun.	Jumlah 2 dokumen penganggaran perubahan RKA-P / DPPA - SKPD yang tersusun selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

V. Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

5. Kegiatan : **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan program SKPD pada era reformasi birokrasi yang sedang marak dilakukan di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Barat pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang sangat mendasar dalam jangka panjang demi mencapai suatu keberhasilan dalam memonitoring, mengevaluasi program kegiatan serta melaporkan. Proses monitoring, evaluasi program kegiatan dan pelaporan sebagai bagian krusial dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan, Monitoring dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan melalui program kegiatan apakah telah sesuai atau tidaknya dengan apa yang telah direncanakan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk diambil tindakan antisipatif, berupa koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan, dan klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. monitoring dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan 6 (enam) bulan dan tahunan.</p>	
2.	Maksud Tujuan	<p>Maksud</p> <p>Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat untuk memonitoring, mengevaluasi, dan mengukur serta melaporkan seberapa jauh capaian kinerja program kegiatan yang telah terlaksana pada Tahun Anggaran 2019, sehingga hasil yang diperoleh dapat menentukan seberapa besar laporan realisasi fisik dan keuangan serta kebijakan yang akan datang.</p> <p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.</li> <li>- Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program.</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan.</li> <li>- Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk meaksanakan kegiatan.</li> <li>- Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan – kesulitan dan hambatan – hambatan selama kegiatan.</li> <li>- Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Dapat terlaksananya kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan program SKPD.	Untuk meningkat pola pikir pegawai khususnya pada organisasi perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat lebih pro – aktif dan antisipasi terkait penyimpangan – penyimpangan dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati, dan apakah target indikator capaian kinerja dari pada program kegiatan tersebut telah sesuai dengan apa telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama (IKU).
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 05 Desember 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 05 Desember 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Seminar Kit / ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Cetak, Foocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> </ul>	<p>6 Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mamuju</li> <li>- Pasangkayu</li> <li>- Mamuju Tengah</li> <li>- Majene</li> <li>- Polewali</li> <li>- Mamasa</li> </ul>

6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.50.000.000,- APBD	Rp.49.066.500,- (98,13%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 1 dokumen laporan monev dan pelaporan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama setahun.	Jumlah 1 dokumen laporan monev dan pelaporan program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran dan evaluasi pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

V.Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

6. Kegiatan : Penyusunan Renstra SKPD (Perencanaan 5 Thn) dan Renja SKPD (Perencanaan 1 Thn).

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD (Perencanaan 5 Thn) dan Renja merupakan suatu kegiatan yang merekap seluruh rangkaian penyusunan program dan kegiatan untuk 5 Tahun Anggaran ke depan ; untuk menyusun rangkaian program dan kegiatan 1 Tahun Anggaran ; menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; serta menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Didalam kegiatan tersebut telah tersusun secara sistematis baik hal perencanaan anggaran dan penyusunan laporan tersebut dapat kita lihat kinerja dari SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun Anggaran 2019.	
2.	Maksud dan Tujuan	Untuk penyusunan Renstra dan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Barat yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai dasar penyusunan RKPJ dan DPA – RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>2. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta Rencana Kerja pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.</li> </ol>	
3.	Sasaran	1 Dokumen Renstra, dan 1 Dokumen Renja.	1 Dokumen Renstra, dan 1 Dokumen Renja.
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 03 Oktober 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 03 Oktober 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	- Belanja Materai - Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid - Belanja Makan dan Minum - Belanja Jasa Honor Non PNS	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 14.678.600,- APBD	Rp. 14.678.600,- (100%)

7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 2 dokumen perencanaan strategi dan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama setahun.	Jumlah 2 dokumen perencanaan strategi dan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li><li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li></ul>	



V.Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**

7. Kegiatan : Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD, dan LKPJ.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Penyusunan Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ suatu kegiatan yang merekap seluruh rangkaian penyusunan program dan kegiatan untuk 5 Tahun Anggaran ke depan ; untuk menyusun rangkaian program dan kegiatan 1 Tahun Anggaran ; menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; serta menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Didalam kegiatan tersebut telah tersusun secara sistematis baik hal perencanaan anggaran dan penyusunan laporan tersebut dapat kita lihat kinerja dari SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun Anggaran 2019	
2.	Maksud dan Tujuan	Untuk penyusunan Renstra dan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Barat yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai dasar penyusunan RKPD dan DPA – RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>2. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta Rencana Kerja pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.</li> </ol>	
3.	Sasaran	1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen LPPD dan 1 Dokumen LKPJ	1 Dokumen LAKIP, 1 Dokumen LPPD dan 1 Dokumen LKPJ
4.	Tempat & Waktu Pelaksanaan	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 18 Desember 2019	Tempat : Badan Kesbang Pol. Tanggal : 18 Desember 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa lainnya, peralatan/suku cadang atau tenaga ahli secara rinci).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Cetak, Fotocopy dan Jilid</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Jasa Honor Non PNS</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 14.734.900,- APBD	Rp. 14.544.900,- (98,71%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 3 dokumen pelaporan inti : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKijP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang tersusun selama setahun.	Jumlah 3 dokumen pelaporan inti : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKijP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat yang tersusun selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindaklanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

**B. Urusan Wajib**

VI. Program : **Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.**

1. Kegiatan : Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang		<p>Kegiatan Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Hubungan antar individu dalam masyarakat yang selama ini bersifat nasional juga turut berkembang menjadi internasional. Hal ini sebagai sebuah kemajuan besar yang dapat membawa manfaat bagi kepentingan nasional kita. Pola hubungan masyarakat dunia yang semakin terbuka dan cair. Mendorong pula pergerakan dan perlintasan orang asing di Indonesia. Keberadaan orang asing dan lembaga asing di Indonesia sekarang dan kedepan akan terus berkembang, mengingat faktor eksternal serta besarnya faktor internal atau potensi daya tarik yang dimiliki Indonesia pada tingkat hubungan internasional. Pergerakan dan perlintasan orang asing maupun lembaga asing, berkaitan erat dengan keberadaan dan kegiatan mereka di Indonesia. Keberadaan dan kegiatan orang asing, baik secara individu ataupun sebagai lembaga, idealnya sesuai dengan asas kemanfaatan, dimana keberadaan dan kegiatan orang asing dan lembaga asing harus mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum.</p>
2.	Maksud dan Tujuan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan, mempersiapkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan pengawasan orang asing dan lembaga asing di Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah dalam pengawasan orang asing dan lembaga asing.</li> <li>- Penguatan koordinasi dan kerjasama diantara lembaga pemerintah dan lintas sektoral serta pemangku kepentingan terkait.</li> <li>- Mendorong upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap orang asing dan lembaga asing tanpa menagabaikan faktor keamanan dan kepentingan nasional.</li> <li>- Untuk menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan dalam</li> </ul>

		<p>negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional, serta agar para pemangku kepentingan meningkatkan keterpaduan dan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai tugas, fungsi, dan keamanan dan kewenangan masing-masing berdasarkan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar pemetaan orang asing dan lembaga asing cepat diketahui lebih awal, untuk melakukan preventif dan pencegahan, sehingga TIMPORA dengan melibatkan peran serta dinas/Instansi unsurterkait lainnya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Antara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA)</li> <li>- Unsur TNI dan POLRI</li> <li>- Instansi Terkait</li> <li>- Ormas dan LSM</li> <li>- Media Cetak dan Elektronik</li> </ul>	60 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel Lilianto, Polewali</p> <p>Waktu : 19 Juni 2019</p>	<p>Tempat : Hotel Lilianto, Polewali</p> <p>Waktu : 19 Juni 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sulbar.

		<p>Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.150.000.000,-	Rp.143.914.900,- (95,94%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 6 kabupaten yang dipantau untuk mengawasi orang asing dan lembaga asing selama setahun.	Jumlah 6 kabupaten yang dipantau untuk mengawasi orang asing dan lembaga asing selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

VI. Program : **Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.**

2. Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang		<p>Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 07 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi dengan seluruh unsur tingkatan pemerintahan, baik di tingkat Nasional, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota. Penanganan konflik sosial sebagaimana dimaksud juga harus dilakukan secara komprehensif, integrative, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, serta tepat sasaran melalui langkah-langkah pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan konflik.</p> <p>Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten / Kota juga. Salah satu tugas dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yaitu menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang meliputi kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tersebut, dilakukan mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang di setiap tingkatan pemerintahan terhadap target keberhasilan rencana aksi dalam waktu / periode tertentu.</p> <p>Penginputan Laporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2019 terbagi 4 (Empat) diantaranya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periode Target B.04 (Bulan April) Tahun 2019;</li> <li>2. Periode Target B.08 (Bulan Agustus) Tahun 2019; dan</li> <li>3. Periode Target B.12 (Bulan Desember) Tahun 2019.</li> </ol>

		<p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka menjalankan amanat Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial khususnya maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019, yaitu untuk mewujudkan dan meningkatkan koordinasi, keterpaduan, serta sinergitas antar seluruh unsur aparatur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten</li> <li>• Tujuan Yakni sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan kinerja Tim Terpadu penanganan konflik Sosial, yang salah satunya diukur dari pencapaian target keberhasilan dalam pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik social pada masing-masing Provinsi, khususnya pada target pelaporan</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Kesbangpol Prov. Sulbar</li> <li>2. Biro Tapem Setda Prov. Sulbar</li> <li>3. Dinas Sosial Prov. Sulbar</li> <li>4. Diknas Prov. Sulbar</li> <li>5. Badan Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak Prov. Sulbar</li> <li>6. Dinas Dukcapil Prov. Sulbar</li> <li>7. Dinas Pertanian Prov. Sulbar</li> <li>8. Polda Sulbar</li> </ol>	<p>Sasaran kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Kesbangpol Prov. Sulbar</li> <li>2. Biro Tapem Setda Prov. Sulbar</li> <li>3. Dinas Sosial Prov. Sulbar</li> <li>4. Diknas Prov. Sulbar</li> <li>5. Badan Pemberdayaan Perempuan &amp; Perlindungan Anak Prov. Sulbar</li> <li>6. Dinas Dukcapil Prov. Sulbar</li> <li>7. Dinas Pertanian Prov.</li> </ol>

		<p>9. Korem 142 Tatag</p> <p>10. Lanal Mamuju</p> <p>11. Kantor Imigrasi Sulbar</p> <p>12. Kanwil Kumham Prov. Sulbar</p> <p>13. Kanwil Kemenag Prov. Sulbar</p> <p>14. BPN Prov. Sulbar</p> <p>15. Unsur Intelijen</p>	<p>Sulbar</p> <p>8. Polda Sulbar</p> <p>9. Korem 142 Tatag</p> <p>10. Lanal Mamuju</p> <p>11. Kantor Imigrasi Sulbar</p> <p>12. Kanwil Kumham Prov. Sulbar</p> <p>13. Kanwil Kemenag Prov. Sulbar</p> <p>14. BPN Prov. Sulbar</p> <p>15. Unsur Intelijen</p>
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel Pantai Indah Jl. Badau Nomor 25 Mamuju</p> <p>Waktu :09 Desember 2019</p>	<p>Tempat : Hotel Pantai Indah Jl. Badau Nomor 25 Mamuju</p> <p>Waktu :09 Desember 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 200.000.000,-APBD	Rp.187.051.400,- (93,53%)



7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan konflik sosial dan 2 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 40 peserta kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi penanganan konflik sosial dan 2 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

VI. Program : **Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**

3. Kegiatan : Pemantauan dan Pengamanan Pelaksana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Pemantauan dan Pengamanan Pelaksana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana untuk mendapatkan legitimasi bagi sebuah pemerintahan. Sehingga dengan demikian, pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan merupakan pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Oleh karena itu, untuk suksesnya pemilu saja, tapi juga harus didukung seluruh pemangku kepentingan pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan. Diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas pemilu tersebut.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan Kabupaten serta instansi unsure terkait lainnya beserta jajarannya dalam upaya menciptakan pemilu damai, aman dan demokratis.</li> <li>- Agar Terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif melalui rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 menuju stabilitas daerah, rangka menyambut pemilihan umum (pemilu) tanggal 17 April 2019 mendatang.</li> <li>- Terciptanya serta terpelihara situasi dan kondusi yang kondusif bagi penyelenggara pemerintah, pembangunan dan kehidupan bermasyarakat di daerah melalui peningkatan pembauran kebangsaan menuju stabilitas daerah provinsi Sulawesi Barat pada khususnya dan stabilitas nasional pada umumnya.</li> <li>- Sebagai wadah koordinasi, konsolidasi dan penguatan antara pemerintahan provinsi kabupaten serta instansi dan unsur yang terkait dalam pemantapan persiapan pra maupun pasca pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden</li> </ul>	

		<p>tahun 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah dalam pelaksanaan pemilu presiden dan Wakil presiden tahun 2019.</li> </ul> <p>Tujuan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bertujuan meminimalisir berbagai bentuk permasalahan yang mengemuka, baik pra maupun pasca pelaksanaan kegiatan politik lima tahun.</li> <li>- Meningkatkan sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan pemilu dalam upaya mewujudkan stabilitas yang kondusif serta menciptakan pemilu yang demokratis.</li> <li>- Dalam rangka penciptaan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu sehingga perlu diantisipasi sedini mungkin dengan koordinasi yang baik Badan KesbangPol se Sulbar serta para intelijen dari unsure BIN, TNI, Polisi, serta kejaksaan se – sulbar.</li> <li>- Membangun koordinasi, dan komitmen sama untuk mengawal pemilu damai, amin, dan demokratis, mencegah dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan pelanggaran pemilu.</li> </ul>	
3.	Sasaran	Sasaran Kegiatan Pemantaun dan Pengamanan Pelaksana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2019 di 6 (Enam) Kabupaten Se Sulawesi Barat.	Sasaran Kegiatan Pemantaun dan Pengamanan Pelaksana Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif tahun 2019 di 6 (Enam) Kabupaten Se Sulawesi Barat.
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat :Ruang Rapat Lt.II Kantor Gubernur Sulawesi Barat Waktu : 11 April 2019	Tempat :Ruang Rapat Lt.II Kantor Gubernur Sulawesi Barat Waktu : 11 April 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sulbar dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.67.308.352,-	Rp.67.308.352,- (100%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 6 kabupaten yang dipantau pengamanan pelaksanaan pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif, 40 orang peserta yang mengikuti rapat hasil pemantauan, dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 6 kabupaten yang dipantau pengamanan pelaksanaan pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif, 40 orang peserta yang mengikuti rapat hasil pemantauan, dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

VII. Program : **Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**

1. Kegiatan : **Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat merupakan keberhasilan dan suksesnya pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak oleh karena itu dibutuhkan peran dan dukungan semua komponen bangsa untuk membangun dan menciptakan stabilitas keamanan dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), Perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksi dan pencegahan dini. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, keterpaduan, serta sinergitas antar seluruh unsure terkait dalam FKDM dan TKD sehingga tetap terjaga dan terpelihara kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan di daerah</li> <li>- Menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta instansi dan unsure terkait lainnya beserta jajarannya dalam upaya pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah</li> </ul> <p>Tujuan</p> <p>yakni meningkatkan partisipasi seluruh unsur FKDM dan TKD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi terjaganya kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas</p>	

		keamanan dan ketertiban umum di daerah	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Kesbangpol dan Kabid Kewaspadaan Badan Kesbangpol se-Sulawesi Barat.</li> <li>2. Tim Kewaspadaan di daerah (TKD) Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>3. Unsur Forum Kewaspadaan Dini MASYARAKT (FKDM) Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>4. Unsur Intelijen.</li> </ol>	<p>Sasaran kegiatan Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Kesbangpol dan Kabid Kewaspadaan Badan Kesbangpol se-Sulawesi Barat.</li> <li>2. Tim Kewaspadaan di daerah (TKD) Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>3. Unsur Forum Kewaspadaan Dini MASYARAKT (FKDM) Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>4. Unsur Intelijen.</li> </ol>
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat :Aula Hotel Pantai Indah Jln. Badau, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Prov. Sulbar</p> <p>Waktu : Jumat, 18 Oktober 2019</p>	<p>Tempat Aula Hotel Pantai Indah Jln. Badau, Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Prov. Sulbar</p> <p>Waktu : Jumat, 18 Oktober 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Sulbar

		Pendukung dan Peserta Kegiatan	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.130.000.000,-	Rp.127.409.200,- (98,01%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta yang mengikuti rapatfasilitasi FKDM selama setahun.	Jumlah 40 peserta yang mengikuti rapatfasilitasi FKDM selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

VIII. Program : **Pendidikan Politik Masyarakat.**

1. Kegiatan : Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula sebagai Negara demokratis, Kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan, dimana kehadirannya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat, penyeimbang kekuatan politik serta sebagai saran pengkritik dan control terhadap pemerintah yang berkuasa.	Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang kewajiban dan tanggung jawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik biasa diartikan sebagai usaha sadar dan tersismatis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang, sehingga diberikanlah pendidikan politik bagi masyarakat oleh parpol dan lembaga demokrasi lainnya baik di Provinsi dan Kabupaten di seluruh Indonesia.
2.	Maksud dan Tujuan	Maksud Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik, serta berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, sehingga para pemilih pemula memperoleh gambaran tentang jejak rekan parpol, dikhawatirkan akan muda digiring untuk memilih caleg atau parpol tertentu yang sebenarnya belum tentu mampu untuk mengakomodasi aspirasi mereka. Lebih jauh lagi masifnya pemberitaan tentang kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kader parpol dikhawatirkan akan membuat remaja bersikap apatis terhadap politik yang pada akhirnya	



		<p>tidak menggunakan hak pilihnya alias golput</p> <p>Tujuan - Memberikan pemahaman kepada pemilih pemula mengenai peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang partai politik dan pemilu serta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pemahaman berbagai hal tentang pemilu dan menjadikan pemilih yang cerdas yakni pemilih yang sadar menggunakan hak pilihannya dan dapat memilih pemimpin yang berkualitas demi perbaikan masa depan bangsa dan negara</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran kegiatan Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula Antara Lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan /Kantor Kesbang Pol Kab. Polewali Mandar.</li> <li>2. Badan /Kantor Kesbang Pol Kab.Mamuju</li> <li>3. Badan/Kantor Kesbang Pol Kab. Pasangkayu</li> <li>4. Para warga Negara yang telah memiliki EKTP.</li> <li>5. Siswa/siswi SMA/SMK sederajat.</li> </ol>	<p>400 Orang Pemilih dan 5 Kali Pelaksanaan</p>
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aula Hotel Istana Wonomulyo Kab. Polewali Mandar</li> <li>- Hotel d’ Maleo &amp; Convention Kabupaten Mamuju</li> <li>- Hotel Bumi Raya Kab. Polewali Mandar</li> <li>-Hotel Tri Sakti Pasangkayu</li> </ul> <p>Waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamis, 14 Februari 2019</li> <li>- Jumat, 15 Maret 2019</li> <li>- Jumat, 29 Maret 2019</li> <li>- Sabtu, 07 Desember 2019</li> </ul>	<p>Tempat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aula Hotel Istana Wonomulyo Kab. Polewali Mandar</li> <li>- Hotel d’ Maleo &amp; Convention Kabupaten Mamuju</li> <li>- Hotel Bumi Raya Kab. Polewali Mandar</li> <li>- Hotel Tri Sakti Pasangkayu</li> </ul> <p>Waktu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamis, 14 Februari 2019</li> <li>- Jumat, 15 Maret 2019</li> <li>- Jumat, 29 Maret 2019</li> <li>- Sabtu, 07 Desember 2019</li> </ul>

5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.680.763.000,- APBD	Rp.666.778.754,- (97,95%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 400 orang pemilih yang mengikuti sosialisasi pendidikan budaya politik bagi pemilih pemula dan 5 kali pelaksanaan sosialisasi.	Jumlah 400 orang pemilih yang mengikuti sosialisasi pendidikan budaya politik bagi pemilih pemula dan 5 kali pelaksanaan sosialisasi.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

IX. Program : **Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.**

1. Kegiatan : Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan Ormas.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan Ormas merupakan yang telah membentuk tim yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan data dan informasi berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan Ormas, melakukan registrasi identifikasi serta penanganan Ormas dan melakukan monitoring dan evaluasi tidak lanjut pembinaan fasilitasi, identifikasi Organisasi Kemasyarakatan. Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah perlunya identifikasi, evaluasi dan penanganan Ormas, dalam menciptakan tertib administrasi dari Ormas tersebut dan juga dapat diketahui perkembangan dari Organisasi Masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan itu sangat relevan untuk terus menerus memberikan evaluasi identifikasi dan langkah-langkah yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah sehingga mampu menciptakan tata kelola terkait Dinamika Organisasi tersebut.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan Tim Fasilitasi, Identifikasi, Evaluasi dan Penanganan Ormas dimaksudkan sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitasi serta upaya membina, memelihara dan meningkatkan kerjasama demi kemajuan Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Dimaksudkan sebagai upaya membina, memelihara dan meningkatkan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang fungsi, hak dan kewajiban Ormas di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Untuk peningkatan kapasitas fungsi dan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Sulawesi Barat.</li> </ul> <p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitasi serta kajian aktivitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Sulawesi Barat.</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adalah untuk memperkuat sistem kinerja Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pemantauan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan secara terencana dan sistematis.</li> <li>- Terlaksananya komunikasi dan koordinasi serta terciptanya kesamaan persepsi kegiatan dan keberadaan Ormas di Sulawesi Barat.</li> <li>- Terciptanya data base Ormas di Sulawesi Barat baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar.</li> <li>- Melakukan pemantauan, rapat koordinasi dan evaluasi, keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>- Terbinanya Ormas sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Dialog Pemerintah Dengan Ormas Antara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesbangpol se Provinsi Sulawesi Barat</li> <li>- Ormas</li> <li>- LSM</li> <li>- Tokoh Masyarakat</li> <li>- Tokoh Pemuda</li> <li>- Mahasiswa</li> </ul>	40 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel Pantai Indah</p> <p>Waktu : 20 September 2019</p>	<p>Tempat : Hotel Pantai Indah</p> <p>Waktu : 20 September 2019</p>
5.	Keperluan Bahsan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.

		<p>penggandaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.100.000.000,- APBD	Rp.98.779.600,- (98,78%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 10 Ormas yang telah mendapat fasilitasi, identifikasi, dan evaluasi serta dokumen laporan, 40 peserta ormas yang mengikuti rapat dengan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 10 Ormas yang telah mendapat fasilitasi, identifikasi, dan evaluasi serta dokumen laporan, 40 peserta ormas yang mengikuti rapat dengan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

IX. Program : **Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.**

2. Kegiatan :Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)  
Kabupaten Se – Sulawesi Barat

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	-	
2.	Maksud dan Tujuan	-	
3.	Sasaran	-	-
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat - Waktu : -	Tempat : - Waktu : -
5.	Keperluan Bahsan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	-	-
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.0 ,- APBD	Rp.0 ,- (0%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	-	-
8.	Permasalahan	Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten se-Sulawesi Barat tidak dapat terealisasi di APBD Pokok, karena terdapat kesalahan dalam penginputan salah masuk Program sehingga kegiatan tersebut harus dibintang, dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan nanti setelah diadakan APBD Perubahan.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya merencanakan, mengidentifikasi, mengelompokkan kegiatan yang sesuai dengan programnya masing-masing dengan baik.</li> <li>- Perlunya ketelitian dalam proses penginputan RENJA, RKPD dan RKA/DPA.</li> </ul>	

IX. Program : **Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.**

3.Kegiatan :Dialog Pemerintah Dengan Ormas.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan, membawa paradigma baru tata kelola Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>Pertumbuhan jumlah Ormas sebaran dan jenis kegiatan dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas, untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>Dengan demikian Ormas mempunyai peranan yang sangat strategis, sebagai mitra pemerintah untuk memberdayakan masyarakat guna mewujudkan tujuan nasional dan jika amanat Undang-Undang tentang pengaturan Ormas ini dipahami dan dihayati pimpinan dan anggota Ormas, maka tidak akan ada lagi Ormas yang bertindak anarkis, sampai merusak atau bersikap brutal seperti dalam unjuk rasa.</p> <p>Bahwa dalam rangka penataan dan peningkatan peran serta Orkesmas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan Ormas maupun Lembaga Swasta Kemasyarakatan lainnya oleh pengurus harus memberitahukan kepada Pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi dalam sebuah forum pertemuan yang diharapkan dapat mengatasi berbagai isu-isu strategis bidang ke-Ormas-an mana tadi dengan melibatkan stakeholder terkait baik unsure pemerintah maupun masyarakat yang berhimpun dalam sebuah organisasi kemasyarakatan.</li> <li>- Adalah sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitasi serta upaya membina, memelihara dan meningkatkan persatuan dan</li> </ul>	

		<p>kesatuan serta kerjasama demi kemajuan Provinsi Sulawesi Barat yang Malaqbiq.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai upaya membina, memelihara dan meningkatkan keberadaan Ormas meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang fungsi, hak dan kewajiban Ormas di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Untuk membangun sinergitas antara Ormas yang berada di Provinsi Sulawesi Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta menyamakan persepsi tentang ketugasan dan mekanisme kerja.</li> </ul> <p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan dialog dengan tujuan untuk saling bertukar informasi serta memberikan gagasan terhadap permasalahan yang terjadi.</li> <li>- Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk membangun komunikasi yang efektif antara Ormas, LSM, OKP serta organisasi mahasiswa bersama pemerintah daerah untuk dapat berkontribusi positif dalam pembangunan daerah.</li> <li>- Terjalannya komunikasi dan koordinasi serta terciptanya dengan baik dan kesamaan langkah dan tindak antara Ormas dan Pemerintah Provinsi yang berada di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Dialog ini bertujuan untuk mewujudkan situasi dan kondisi daerah yang kondusif, sehingga semakin memicu lancarnya pelaksanaan pembangunan di daerah.</li> <li>- Agar pemerintah bisa mendapatkan berbagai masukan dan informasi baik di daerah maupun di pusat. Sebagai input dalam perumusan dan pengembangan kebijakan ke-Ormas-an.</li> <li>- Agar terbinanya Ormas sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesatuan dan persatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mendukung peran pemerintah dengan menjadi juru damai dan penjaga keamanan dari kemungkinan konflik-konflik antar kepentingan dalam masyarakat.</li> <li>- Untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan politik dalam negeri, diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan Ormas dan lembaga Nirlaba lain.</li> </ul>
--	--	---



		Sehingga diharapkan peran sosial kontrol dapat dijalankan lebih maksimal.	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Dialog Pemerintah Dengan Ormas Antara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesbangpol se Provinsi Sulawesi Barat</li> <li>- Ormas</li> <li>- LSM</li> <li>- Tokoh Masyarakat</li> <li>- Tokoh Pemuda</li> <li>- Mahasiswa</li> </ul>	40 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel D'Maleo Jl. Yos Sudarsi No.52</p> <p>Waktu : Senin, 23 Mei 2019</p>	<p>Tempat : Hotel D'Maleo Jl. Yos Sudarsi No.52</p> <p>Waktu : Senin, 23 Mei 2019</p>
5.	Keperluan Bahsan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.74.643.600,- APBD	Rp.74.643.400,- (100%)

7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta yang mengikuti dialog pemerintah daerah dan Ormas dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 40 peserta yang mengikuti dialog pemerintah daerah dan Ormas dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

IX. Program : **Peningkatan Kapasitas Fungsi dan Keberadaan Ormas.**

4. Kegiatan : Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	-	
2.	Maksud dan Tujuan	-	
3.	Sasaran	-	-
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat - Waktu : -	Tempat - Waktu : -
5.	Keperluan Bahsan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	-	-
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.0 ,- APBD	Rp.0 ,- APBD
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	-	-
8.	Permasalahan	Kegiatan Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama tidak dapat terealisasi di APBD Pokok, karena terdapat kesalahan dalam penginputan salah masuk Program sehingga kegiatan tersebut harus dibintang, dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan nanti setelah diadakan APBD Perubahan.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya merencanakan, mengidentifikasi, mengelompokkan kegiatan yang sesuai dengan programnya masing-masing dengan baik.</li> <li>- Perlunya ketelitian dalam proses penginputan RENJA, RKPD dan RKA/DPA ke RKA-P/DPPA.</li> </ul>	

X. Program : **Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat.**

1. Kegiatan : Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama merupakan kegiatan yang membahas tentang kerukunan hidup beragama yang merupakan suasana komunikasi yang harmonis dalam dinamika interaksi antar umat beragama, baik interaksi sosial maupun antar kelompok keagamaan. Kerukunan tersebut tercermin dalam pergaulan hidup keseharian umat beragama yang berdampingan secara damai, toleran, saling menghargai kebebasan keyakinan dan beribadat sesuai dengan ajaran agama yang dianut, serta adanya kesediaan dan kemauan melakukan kerjasama sosial dalam membangun masyarakat dan bangsa.</p> <p>FKUB kelak akan berperan besar yang tidak hanya menyangkut persoalan kerukunan, namun juga menyangkut pemberdayaan umat secara keseluruhan. Artinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah yang tidak hanya bekerja menjembatani aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah. Namun lebih dari itu, sebagai “kendaraan” dalam rangka akselerasi penyelesaian persoalan-persoalan umat beragama di lapangan. Peran ini sangat beralasan, mengingat bahwa kedepan kiranya Forum ini dituntut untuk tidak hanya sekedar memfokuskan diri pada hal-hal yang menyangkut banyak kepentingan dan hal-hal yang luas lagi termasuk membangun berbagai kerjasama dalam hal pemberdayaan umat yang terpuruk akibat ketimpangan sosial serta berbagai persoalan yang ditinggalkan akibat konflik.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimaksudkan agar keberadaan FKUB di daerah sangat diperlukan. Peran FKUB terbukti mampu mengelola kerukunan beragama, terutama dalam situasi tertentu. Peran FKUB sangat dibutuhkan, Pemerintah daerah maupun perlu meningkatkan kualitas</li> </ul>	

		<p>kerukunan umat beragama melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Oleh karenanya perlu adanya peningkatan peran dan kinerja FKUB khususnya Provinsi Sulawesi Barat, baik dalam aspek kelembagaan, jaringan, pendanaan serta pemberdayaan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan peningkatan peran FKUB dalam memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitasi membangun sinergitas antara Pemerintah dengan FKUB Provinsi Sulawesi Barat dengan FKUB Kabupaten / Kota, serta menyamakan persepsi tentang tugas dan mekanisme kerja Forum Kerukunan Umat Beragama se-Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Kegiatan ini dimaksudkan untuk merumuskan program kerja yang akan sesuai SK yang telah ditandatangani oleh Gubernur, dimana dibutuhkan kontribusi mereka dalam pembangunan nasional sangat penting, sehingga sinergitas mereka mutlak diperlukan.</li> <li>- Dimaksudkan untuk membahas langkah-langkah dari program kerja FKUB serta bagaimana mendayagunakan peran FKUB bagi upaya terciptanya kerukunan umat beragama baik di tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota, hingga kecamatan dengan didukung oleh Pemerintah sebagai fasilitator FKUB, selain itu untuk meningkatkan frekuensi pertemuan baik terjadwal maupun tidak terjadwal dikalangan anggota FKUB.</li> <li>- Membangun semangat kebersamaan agar wakil suatu agama yang menjadi anggota FKUB hendaknya diakui sebagai wakil semua unsure kelompok agama yang bersangkutan.</li> </ul> <p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjalannya komunikasi dan koordinasi serta terciptanya kesamaan langkah dan tindak antara Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Barat dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten / Kota.</li> <li>- Memelihara dan meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama serta persatuan dan kesatuan di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Menjalani komunikasi dan koordinasi serta kesamaan langkah dan</li> </ul>
--	--	---

		<p>tindak dalam upaya membangun kerukunan umat beragama serta mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi kehidupan beragama di Provinsi Sulawesi Barat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk memperlancar komunikasi antara Pemerintah dan Tokoh Agama dalam hal kerukunan umat beragama, menumbuhkan saling pengertian (Tasamuh) serta menyatukan visi dan misi bersama dalam mengemban amanah para pendiri Bangsa (The Founding Father) tentang kerukunan umat beragama, khususnya kerukunan umat beragama dengan Pemerintah sebagai wujud dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan RI.</li> <li>- Bertujuan untuk membina kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama serta umat beragama dengan pemerintah, sehingga terciptasuatu sinergitas antara umat beragama dengan pemerintah secara bersama-sama menuju kesejahteraan lahir dan batin.</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Dialog Pemerintah Dengan Ormas Antara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesbangpol se Provinsi Sulawesi Barat</li> <li>- Ormas &amp; LSM</li> <li>- Mahasiswa</li> <li>- Tokoh-Tokoh Agama</li> </ul>	40 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel Diana</p> <p>Waktu : 05 Desember 2019</p>	<p>Tempat : Hotel Diana</p> <p>Waktu : 05 Desember 2019</p>
5.	Keperluan Bahsan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.100.000.000,- APBD	Rp.85.751.600,- (85.75%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan peran FKUB dalam memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 40 peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan peran FKUB dalam memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Terdapat kesalahan dalam proses penginputan sehingga Kegiatan Peningkatan Peran FKUB Dalam Memperkuat Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama dilaksanakan pada APBD Perubahan dan kegiatan tersebut tercantum dalam RKA-P/DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya merencanakan, mengidentifikasi, mengelompokkan kegiatan yang sesuai dengan programnya masing-masing dengan baik.</li> <li>- Perlunya ketelitian dalam proses penginputan RENJA, RKPD dan RKA/DPA ke RKA-P/DPPA.</li> </ul>	

X. Program : **Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.**

2. Kegiatan : Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama agama memiliki fungsi ambivalen (bercabang/ bertentangan). Di satu sisi berfungsi sebagai social cement (perekat sosial), yang dapat merekatkan hubungan individu maupun kelompok yang memiliki latar belakang etnik, bahasa dan kelas sosial ekonomi yang berbeda. Agama mampu berperan sebagai alat membangun solidaritas sekaligus loyalitas yang tinggi bagi para pemeluknya. Namun di sisi lain, agama juga mampu menjadi faktor signifikansi bagi munculnya konflik sosial yang luar biasa implikasinya karena melibatkan sisi-sisi yang paling dalam pada emosi manusia. Kemudian, apakah agama lebih mampu menjadi social cement (perekat sosial) atau sebaliknya sebagai conflict maker (pencipta konflik) akan sangat tergantung pada sikap dan tindakan para pemeluknya. Kesadaran akan pentingnya pluralism dan adanya struktur sosial yang adil atau baik dalam mengekspresikan keyakinan baik antar maupun intra agama akan mampu mewujudkan agama sebagai salah satu social cement dalam arti yang luas. Sementara sikap yang didasarkan pada truth claim (menganggap agamanya yang paling benar dan yang lain adalah salah) yang radikal akan lebih memunculkan agama sebagai conflict maker.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkan kembangkan kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Dimaksud sebagai wadah komunikasi, koordinasi serta upaya membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan dan kerukunan dalam menjalankan agama.</li> </ul> </li> </ul>	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjalin komunikasi dan koordinasi serta kesamaan langkah dan tindak dalam upaya membangun kerukunan umat beragama serta mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi kehidupan beragama di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Membangun dan menciptakan rasa toleransi kerukunan umat beragama di wilayah Sulawesi Barat.</li> <li>- Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Identifikasi permasalahan moral agama yang mempengaruhi generasi muda Sulawesi Barat.</li> </ul> </li> </ul>	
3.	Sasaran	Sasaran kegiatan Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama antara lain berbagai Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama di Provinsi Sulawesi Barat.	Sasaran kegiatan Temu Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama antara lain berbagai Tokoh Agama, Generasi Muda Antar Umat Beragama di Provinsi Sulawesi Barat.
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat :Wisma Malaqbi Jl. Pababari, Mamuju - Prov. Sulawesi Barat Waktu : 02 April 2019	Tempat : Wisma Malaqbi Jl. Pababari, Mamuju - Prov. Sulawesi Barat Waktu : 02 April 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat

		Kegiatan - Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.173.704.667,-APBD	Rp.173.404.500,- (99,83%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta yang mengikuti temu tokoh agama, generasi muda antar umat beragama se-Sulbar dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.	Jumlah 40 peserta yang mengikuti temu tokoh agama, generasi muda antar umat beragama se-Sulbar dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

XI. Program : **Fasilitas Politik Dalam Negeri**

1. Kegiatan : **Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga Legislatif maupun eksekutif, partai politik menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah namun, peran strategis tersebut tidak dengan sendirinya dapat berjalan dengan baik. Keterbatasan structural dan financial menyebabkan partai politik gagal menjalankan fungsi perantara. Keterbatasan struktural antara lain ditandai oleh lemahnya jaringan kerja dan organisasi sehingga partai politik tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat. Selain itu, kepemimpinan partai politik yang oligarkis, sering mengabaikan kepentingan masyarakat, konstituen ataupun anggota partai politik</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Tujuan Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2019 Provinsi Sulawesi Barat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui besaran bantuan keuangan Partai Politik Tahun 2019.</li> <li>2. Untuk mengetahui Tata Cara Penghitungan dan Penganggaran Bantuan Keuangan kepada partai Politik Dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>3. Untuk Mengetahui Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik.</li> <li>4. Untuk mengetahui Tata Cara Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.</li> <li>5. Untuk mengetahui Tata Cara Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Polittik.</li> <li>6. Agar terjalinnya sinergitas antara pihak parpol sebagai</li> </ol>	

		<p>penerima bantuan, pemerintah sebagai penyedia anggaran, dan Tim Verifikasi yang mengevaluasi dan merekomendasikan.</p> <p>7. Terciptanya suatu transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan partai politik.</p>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Antara Lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2019.</li> <li>- Pengurus partai politik tingkat provinsi</li> <li>- Instansi terkait</li> </ul>	<p>Sasaran Kegiatan Workshop Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Antara Lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2019.</li> <li>- Pengurus partai politik tingkat provinsi</li> <li>- Instansi terkait</li> </ul>
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Aula Hotel Berkah, Jln Soekarno Hatta</p> <p>Waktu : Senin, 19 Agustus 2019</p>	<p>Tempat : Aula Hotel Berkah, Jln Soekarno Hatta</p> <p>Waktu : Senin, 19 Agustus 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas</li> </ul>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat</p>

		Pendukung dan Peserta Kegiatan	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.63.560.000,-APBD	Rp.60.663.600,- (95,44%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah partai politik yang telah diverifikasi, evaluasi dan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik, 1 kali pelaksanaan rapat dan 1 dokumen laporan yang tersusun selama setahun.	Jumlah partai politik yang telah diverifikasi, evaluasi dan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik, 1 kali pelaksanaan rapat dan 1 dokumen laporan yang tersusun selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

XI. Program : **Fasilitas Politik Dalam Negeri.**

2. Kegiatan : **Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sesudah runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang memompa darah keseluruhan tubuh kenegaraan Republik Indonesia.	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Tujuan Kegiatan Rapat Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah Tahun Anggaran 2019 Provinsi Sulawesi Barat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui perkembangan politik di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat</li> <li>2. Mencegah masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pilkada dan isu-isu perkembangan politik lainnya</li> <li>3. Hasil rapat evaluasi dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Barat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penanganan perkembangan politik di Daerah.</li> </ol>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah Antara Lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pemantau</li> <li>- Tim Desk Pilkada Sulawesi Barat</li> <li>- Instansi terkait KPU Provinsi Sulawesi Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi, Satpol PP Prov. Sulawesi Barat, Kesbangpol se – Provinsi</li> </ul>	<p>Sasaran Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di Daerah Antara Lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pemantau</li> <li>- Tim Desk Pilkada Sulawesi Barat</li> <li>Instansi terkait KPU Provinsi Sulawesi Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi, Satpol PP Prov. Sulawesi Barat, Kesbangpol se – Provinsi</li> </ul>

		Sulawesi Barat, partai politik dan media cetak Elektronik.	Sulawesi Barat, partai politik dan media cetak Elektronik.
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat : Hotel Diana Jl. Emmy Selan Mamuju Waktu : Senin, 26 Agustus 2019	Tempat :Hotel Diana Jl. Emmy Selan Mamuju Waktu :Senin, 26 Agustus 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.358.348.000,-APBD	Rp.332.987.900,- (92,92%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 1 dokumen laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik didaerah selama setahun.	Jumlah 1 dokumen laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik didaerah selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

XI. Program : **Fasilitas Politik Dalam Negeri.**

3. Kegiatan : Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Sulbar.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Sulbar sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratis yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem - sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi politik nasional dewasa ini. Disamping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung oleh penyelenggara pemerintah yang professional dan terbebas dari praktik - praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran serta berbagai jaringan informasi di pusat dan di daerah.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi atau menjadi alat pembanding antar daerah dalam memperoleh gambaran perkembangan demokrasi pada tingkatan provinsi di seluruh Indonesia.</li> <li>- Perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.</li> <li>- Pemerintah, membantu dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik - evidence - based analysis untuk menentukann bidang sasaran yang spesifik untuk diintervensi.</li> <li>- Stakeholder, pembagunan non-pemerintah, mengawasi proses penyusunan dan implementasi perencanaan dalam kebijakan</li> </ul>	



		<p>pembangunan nasional dan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat provinsi dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan - perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Sulbar Antara Lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pokja IDI Sulawesi Barat.</li> <li>- Organisasi Perangkat Daerah Terkait.</li> <li>- Badan Kesbang Pol Se-Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Partai Politik.</li> <li>- Ormas.</li> <li>- Tokoh Masyarakat dan Pemuda.</li> <li>- Media Cetak dan Elektronik.</li> </ul>	<p>Sasaran kegiatan Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Prov. Sulbar Antara Lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim Pokja IDI Sulawesi Barat.</li> <li>- Organisasi Perangkat Daerah Terkait.</li> <li>- Badan Kesbang Pol Se-Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Partai Politik.</li> <li>- Ormas.</li> <li>- Tokoh Masyarakat dan Pemuda.</li> <li>- Media Cetak dan Elektronik.</li> </ul>
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel Pantai Indah Jl. Badau 25 Samping Rumah Adat Rimuku Mamuju Sulbar</p> <p>Waktu : 04 Oktober 2019</p>	<p>Tempat : Hotel Pantai Indah Jl. Badau 25 Samping Rumah Adat Rimuku Mamuju Sulbar</p> <p>Waktu : 04 Oktober 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> </ul>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.179.982.000,-APBD	Rp.161.048.500,- (89,48%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 1 dokumen laporan terkait tentang Peningkatan demokrasi IDI terhadap 3 aspek yaitu : aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik & aspek lembaga demokrasi selama setahun.	Jumlah 1 dokumen laporan terkait tentang Peningkatan demokrasi IDI terhadap 3 aspek yaitu : aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik & aspek lembaga demokrasi selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

XII. Program : Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

1. Kegiatan : Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan merupakan implementasi sebagai sumber dari segala hukum, nilai-nilai Pancasila harus menguasai dan melingkupi aturan hukum dasar dan semua peraturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.</p> <p>Ketika Bangsa Indonesia berkompromi dan berkonsensus untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara yang nilai-nilainya dijunjung tinggi, maka itu berarti Pancasila harus ditempatkan sebagai landasan utama dalam mengatasi keanekaragaman dan kemajemukan dalam masyarakat Indonesia. Tentunya tidak bermaksud menghapuskan perbedaan, tetapi merangkul semuanya dalam semboyan khas Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.</p> <p>Nilai dan makna yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi pedoman dan panduan bagi seluruh warga Negara RI dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa. Nilai-Nilai kandungan Pancasila harus menjadi penuntun bagi bangsa dalam merumuskan dan menetapkan strategi serta pilihan cara yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pemahaman kepada peserta kegiatan tentang arti dan pentingnya fungsi dan kedudukan Pancasila dalam bernegara dan berbangsa.</li> <li>- Memberikan pemahaman kepada para peserta tentang nilai-nilai yang dikandung Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa.</li> </ul> <p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para peserta dapat mengerti dan memahami fungsi serta kedudukan Pancasila yang sangat penting dalam tata kenegaraan</li> </ul>	

		Republik Indonesia. - Para peserta sebagai warga Negara memiliki kesadaran dan tekad untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.	
3.	Sasaran	Sasaran Peserta yang hadir yaitu :Pengurus/Anggota FPK Sulawesi Barat, Organisasi Pemuda berbasis keagamaan, Unsur Pers dan Unsur Pemerintah setempat (Lurah).	40 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat : Marannu Golden Hotel, Mamuju Waktu : 16 Juli 2019	Tempat : Marannu Golden Hotel, Mamuju Waktu : 16 Juli 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.74.528.000,- APBD	Rp.74.436.000,- (99,88%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta memahami bahwa Pancasila adalah satu-satunya Ideologi yang paling tepat dan pantas dalam	Jumlah 40 pes Jumlah 40 peserta memahami bahwa Pancasila adalah satu-satunya Ideologi yang paling tepat dan pantas dalam

		kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun dengan 1 dokumen laporan.	kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI dan 1 kali pelaksanaan rapat selama setahun dengan 1 dokumen laporan.
8.	Permasalahan	Kegiatan Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Komunitas Masyarakat Berbasis Keagamaan mengalami rasionalisasi anggaran tetapi tidak mengurangi daripada ouput yang akan dicapai pada tahun 2019.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

- XII. **Program** : **Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan**  
2. **Kegiatan** : Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbiq.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Dialog Lintas SARA Dalam memperkuat Komitmen kerukunan Bangsa untuk Sulawesi Barat Malaqbiq Negara Indonesia adalah Negara yang bersifat plural dalam berbagai hal, baik ras, suku, Bahasa daerah, adat istiadat dan agama. Kebaragaman ini sesungguhnya merupakan kekayaan bagaikan mozaik yang sangat indah dan berharga jika mampu dikelola dengan baik. Namun kekayaan keberagaman tersebut bisa menjadi ancaman yang menghancurkan jika tidak mampu dikelola secara baik dan cerdas sebagaimana yang terjadi di pertikaian berlatar SARA. Hal yang sama juga ditunjukkan dari beberapa Negara dulunya begitu besar, kuat dan digjaya namun harus tunjuk pada alur sejarahnya menjadi Negara-negara kecil terpisah-pisah, seperti Uni Soviet yang terpecah-pecah menjadi 15 negara. Semua itu adalah contoh dari ketidakmampuan Negara dan bangsa yang tidak cerdas memenage kekayaan keberagaman SARA yang mereka miliki.	
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud</p> <p>Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman warga Negara (Peserta) tentang pentingnya memelihara kerukunan antar warga. Sekaligus meningkatkan kesadaran warga (peserta) untuk terlibat aktif dalam upaya-upaya pemeliharaan / peningkatan kerukunan antar warga masyarakat demi terwujudnya Sulawesi Barat yang Malaqbi.</p> <p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbangunnya Kesadaran bersama tentang pentingnya dialog meskipun dengan latar SARA yang berbeda- beda.</li> <li>- Tertanam kesadaran dan cara pandang warga Negara (peserta) tentang pentingnya memelihara ke – Tunggal Ika-an dalam ke Bhinneka-an.</li> <li>- Terbangunnya pemahaman dan kesadaran dari semua peserta tentang pentingnya memperkuat komitmen kerukunan dalam</li> </ul>	

		<p>mencapai cita-cita bersama yakni daerah Sulawesi Barat yang maju dan mallaqbi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tertanamnya kesadaran peserta untuk berpartisipasi aktif dalam memelihara keberagaman dalam semangat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.</li> </ul>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran kegiatan Dialog Lintas Sara Dalam memperkuat Komitmen kerukunan Bangsa untuk Sulawesi Barat Mallaqbiq Antara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur Tokoh dari berbagai agama yang berbeda - beda.</li> <li>- Unsur Tokoh pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan dan agama</li> <li>- Unsur Tokoh Masyarakat dari berbagai etnis dan suku bangsa.</li> <li>- Unsur jurnalis.</li> <li>- Ditambah unsur pemerintah daerah</li> </ul>	<p>100 Peserta untuk dua kali pelaksanaan kegiatan 50 Peserta Kabupaten Polewali Mandar dan 50 Peserta di Kabupaten Majene</p>
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Hotel Lilianto Polewali Mandar Hotel Villa Bogor Leppe Majene</p> <p>Waktu : - 30 April 2019 - 13 Mei 2019</p>	<p>Tempat : Hotel Lilianto Polewali Mandar Hotel Villa Bogor Leppe Majene</p> <p>Waktu : - 30 April 2019 - 13 Mei 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan</li> </ul>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.</p>

		<p>penggandaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.198.902.000,- APBD	Rp.198.868.000,- (99,98%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta yang mengikuti kegiatan dialog lintas SARA dalam memperkuat komitmen kerukunan bangsa untuk Sulawesi Barat Malaqbiq, 1 kali pelaksanaan dan 1 dokumen laporan.	Jumlah 40 peserta yang mengikuti kegiatan dialog lintas SARA dalam memperkuat komitmen kerukunan bangsa untuk Sulawesi Barat Malaqbiq, 1 kali pelaksanaan dan 1 dokumen laporan.
8.	Permasalahan	Kegiatan Dialog Lintas SARA Dalam Memperkuat Komitmen Kerukunan Bangsa Untuk Sulawesi Barat Malaqbiq mengalami rasionalisasi anggaran tetapi tidak mengurangi daripada ouput yang akan dicapai pada tahun 2019.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	



- XII. **Program** : **Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan**  
3. **Kegiatan** : Musyawarah Kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019-2024.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	<p>Kegiatan Musyawarah Kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019-2024 Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan tingkah sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Hasil pandangan tersebut akan membentuk watak warga Negara yang menyadari bahwa Negara Indonesia yang berbentuk kepulauan adalah merupakan satu kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan system pertahanan dan keamanan, serta segala macam aspek kehidupan yang serba satu dalam bingkai NKRI. Sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 71 TAHUN 2021 diwajibkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah tersebut maka dituntut untuk melaksanakan upaya pengembangan pementapan wawasan kebangsaan melalui penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan di wilayah masing-masing.</p>	
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maksud                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan penggantian personil pengurus PPWK Provinsi Sulawesi Barat Periode tahun 2014-2017</li> <li>b. Mensosialisasikan tugas dan fungsi PPWK kepada semua pihak yang terlibat dalam kelompok kerja tersebut</li> </ul> </li> <li>- Tujuan                             <p>Tujuan kegiatan ini sebagai upaya optimalisasi PPWK sebagai kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya</p> </li> </ul>	

		<p>sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI,</li> <li>b. Mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada indeks demokrasi Indonesia.</li> <li>c. Mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan local.</li> <li>d. Memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK.</li> <li>e. Memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan.</li> <li>f. Membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat local, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.</li> </ol>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Musyawarah Kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019-2024 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur Forkopimda</li> <li>- Tokoh Masyarakat,</li> <li>- Tokoh Agama</li> <li>- Tokoh Adat</li> <li>- Partai Politik</li> <li>- Akademis</li> <li>- Media Elektronik dan Media Cetak serta LSM</li> </ul>	40 Peserta

4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Tempat : Maleo Town Square (Matos) Hotel & Convention Waktu : Senin, 09 Desember 2019	Tempat : Maleo Town Square (Matos) Hotel & Convention Waktu : Senin, 09 Desember 2019
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait.
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp. 75.000.000,-APBD	Rp.74.946.800,- (99,93%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 pesertaMusyawarah Kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019-2024, 1 kali pelaksanaan rapat dan 1 dokumen laporan selama setahun.	Jumlah 40 peserta Musyawarah Kerja PPWK Sulawesi Barat Dalam Rangka Pembentukan Pengurus Baru Untuk Periode 2019-2024, 1 kali pelaksanaan rapat dan 1 dokumen laporan selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

XII.Program :**Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan.**

4. Kegiatan:Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten se – Sulawesi Barat.

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang	Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum PembauranKebangsaan (FPK) Kabupaten se – Sulawesi Barat.	Indonesia merupakan sebuah bangsa yang sangat kaya akan sumber daya alam yang melimpah serta memiliki keragaman yang tersebar dan menghuni secara damai wilayah Nusantara tersebut merupakan cirri bangsa Indonesia dan juga merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat penting untuk disyukuri oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk membangun kesedaran bahwa menjaga keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara adalah tugas bersama.Keberagaman suku, adat istiadat, budaya dan agama adalah karunia besar bagi bangsa ini jika keberagaman itu dapat dikelola dengan baik. Namun dapat juga menjadi sumber malapetaka bagi kelangsungan bangsa dan Negara Indonesia bila kebhinnekaan yang ada tidak dapat dikelola dengan cara-cara yang baik, efektif dan bijaksana. Pengelolaan keragaman tersebut harus dapat membangun kesadaran dan komitmen kuat dari setiap individu warga Negara, bahwa perbedaan tidak akan pernah menjadi bibit pertengkaran, bahwa perbedaan tidak akan pernah menjadi bibit pertengkaran, bahwa perbedaan adalah sebuah anugerah, bahwa keharmonisan dalam mendorong proses pencapaian cita-cita dari Negara besar ini.
2.	Maksud dan Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksud kegiatan ini adalah melakukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi dan Kabupaten se – Sulawesi Barat dalam upaya meningkatkan toleransi dan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>• Tujuan Kegiatan ini adalah :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan dialog antar Pengurus FPK Provinsi dan Kabupaten Sulawesi Barat.</li> <li>2. Menampung dan mengakomodir Aspirasi Anggota / Pengurus FPK Se – Sulawesi Barat.</li> </ol> </li> </ul>	

		<p>3. Mendorong Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan agar lebih mengoptimalkan perannya dalam pembangunan, memelihara ketentraman Masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman Keutuhan Bangsa khususnya di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.</p> <p>4. Mengkoordinasikan pimpinan organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat di Wilayah Prov. Sulawesi Barat.</p>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten se - Sulawesi Barat adalah pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi dan Kabupaten se - Sulawesi Barat yang merupakan perwakilan dari setiap Suku / Ras yang Wilayah di Provinsi Sulawesi Barat.</p>	50 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Marannu Golden Hotel , Jl. Tuna Mamuju</p> <p>Waktu : Kamis 19 - 20 Desember 2019</p>	<p>Tempat : Marannu Golden Hotel , Jl. Tuna Mamuju</p> <p>Waktu : Kamis 19 - 20 Desember 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.75.000.000,- APBD	Rp.74.016.800,- (000%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 50 peserta yang mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten se – Sulawesi Barat, 1 kali pelaksanaan rapat dan 1 dokumen laporan selama setahun.	Jumlah 50 peserta yang mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten se – Sulawesi Barat, 1 kali pelaksanaan rapat dan 1 dokumen laporan selama setahun.
8.	Permasalahan	Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten se – Sulawesi Barat tersebut merupakan kegiatan yang terlaksana setelah dilakukan APBD Perubahan, kegiatan tersebut tercantum dalam RKA-P / DPPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

XIII. Program : **Program Pembinaan Karakter Bangsa.**

1. Kegiatan : **Pembentukan Kader Bela Negara Generasi Muda dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.**

No.	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Latar Belakang		<p>Pembentukan Kader Bela Negara Generasi Muda dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah proses yang berat dan panjang yang dimulai dari keberadaan kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh nusantara. Setelah melalui berbagai tahapan dan tantangan sejarah, akhirnya tumbuh kesadaran baru dan tekad yang sama untuk membentuk satu negara kesatuan. Selanjutnya kesadaran serta kemauan membentuk suatu negara yang merdeka tersebut mencapai hasilnya dengan bergaungnya pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun babakan sejarah NKRI tercinta ini ternyata masih menghadapi cobaan yang tidak lebih mudah dalam mempertahankan keutuhannya sebagai sebuah bangsa. Ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI dari waktu ke waktu terus berkembang. Saat ini ancaman yang dihadapi tidak hanya bersifat konvensional saja atau fisik semata akan tetapi sudah berkembang pula ancaman yang berbentuk non fisik atau non militer. Bahkan ancaman lebih berkembang menjadi bersifat multidimensi karena karakternya dapat bersumber dari ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.</p>
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan kader Bela Negara dimaksudkan untuk menanamkan kembali nilai-nilai dan sikap bela Negara serta rasa cinta tanah air bagi generasi muda yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>2. Menanamkan sikap rela berkorban bagi bangsa dan Negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 digenerasi muda (Peserta)</li> <li>3. Memperkuat rasa nasionalisme di kalangan generasi muda agar tidak terpengaruh paham atau ideologi dan yang berpotensi merusak NKRI yang disusupkan melalui isu-isu</li> </ol>	

		<p>bernuansa SARA dan disparitas pembangunan.</p> <p>Tujuan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk kader Bela Negara dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang berasal dari komponen masyarakat terutama generasi muda.</li> <li>2. Para peserta sebagai kader bela Negara dapat memahami pengertian bela Negara.</li> <li>3. Para peserta memiliki kesadaran, tekad dan sikap serta perilaku dan tindakan Bela Negara yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas segala –galanya.</li> </ol>	
3.	Sasaran	<p>Sasaran kegiatan Kader Bela Negara Generasi Muda dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Antara Lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Kesatuan bangsa dan Politik.</li> <li>- Satuan Polisi Pamong Praja.</li> <li>- Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</li> <li>- Tagana (Dinas Sosial)</li> </ul>	40 Peserta
4.	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	<p>Tempat : Makorem 142 Tatag, Kabupaten Mamuju</p> <p>Waktu : 12 Maret s/d 14 Maret 2019</p>	<p>Tempat : Makorem 142 Tatag, Kabupaten Mamuju</p> <p>Waktu : 12 Maret s/d 14 Maret 2019</p>
5.	Keperluan Bahan (Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang atau Tenaga Ahli secara rinci)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja ATK</li> <li>- Belanja Materai</li> <li>- Belanja Spanduk</li> <li>- Belanja Dokumentasi</li> <li>- Belanja Transportasi</li> <li>- Belanja Cetak dan penggandaan</li> <li>- Belanja Penjilidan</li> </ul>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dan beberapa instansi terkait.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Sewa Gedung</li> <li>- Belanja Makan dan Minum</li> <li>- Belanja Perjalanan Dinas</li> <li>- Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan</li> </ul>	
6.	Anggaran / Sumber Dana	Rp.143.770.400,- APBD	Rp.143.560.400,- (99,85%)
7.	Produk yang dihasilkan (Output)	Jumlah 40 peserta yang mengikuti kegiatan Kader Bela Negara Generasi Muda dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 1 kali pelaksanaan pembentukan bela negara, dan 1 dokumen laporan selama setahun.	Jumlah 40 peserta yang mengikuti kegiatan Kader Bela Negara Generasi Muda dan Masyarakat Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 1 kali pelaksanaan pembentukan bela negara, dan 1 dokumen laporan selama setahun.
8.	Permasalahan	Tidak adanya permasalahan dalam kegiatan tersebut sehingga dapat terealisasi dengan baik.	
9.	Saran / Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya peningkatan perhatian pimpinan dalam penyusunan anggaran pada kegiatan tersebut.</li> <li>- Perlunya digunakan dengan baik alokasi anggaran pada kegiatan tersebut.</li> </ul>	

Mamuju, 27 Februari 2020  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Sulawesi Barat

**Drs.H. MUHAMMAD RAHMAT, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023

**BAB VI.**

**PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH DAERAH**

**A. Kerjasama Antar Daerah**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

**B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

**C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

**D. Pembinaan Batas Wilayah**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

**E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana (BPBD)**

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Potensi Bencana Yang Diperkiraan Terjadi

**F. Pengelolaan Kawasan Khusus**

1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
2. Sumber Anggaran
3. Permasalahan Yang Dihadapi dan Solusi.

### **G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (KESBANGPOL dan SATPOL PP).**

#### **1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya).**

Penanganan konflik sosial yang dilakukan selama ini masih bersifat parsial dan belum komprehensif, sehingga mengakibatkan munculnya komplek berupa tindakan yang eksekutif terhadap pelaku, dugaan pelanggaran HAM, dan bahkan ada penilaian ragu-ragu, tidak mampu, serta seolah-olah ada kesan terjadi pembiaran.

#### **2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

- Kabinda Provinsi Sulawesi Barat.
- Kakesbang Pol se- Sulawesi Barat.
- Kapolres se- Sulawesi Barat.
- Pasi Intel Kodim se-Sulawesi Barat.
- Kasat Intel Polres se-Sulawesi Barat.
- Anggota Bais TNI.
- Ketua KPU dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Anggota Kominda Provinsi Sulawesi Barat.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.
- Kasatpol Satpol PP se-Sulawesi Barat.
- Kavid. Keimigrasian Provinsi Sulawesi Barat.
- Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.
- Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
- Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Barat.
- Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat.
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- FKUB Provinsi Sulawesi Barat.
- FKDM Provinsi Sulawesi Barat.
- Danpos Al.
- Kapolsek Tommo.
- Kapolsek Budong – Budong.
- Kapolsek Pangale.
- Kapolsek Mamuju.
- Posda BIN Kab.Mamasa, Polman, & Majene.

- Kasiei Intel Kab. Mamasa, Polman & Majene.
- Pasie OPS Dandim Kab. Mamasa, Polman & Majene.
- Pasie Intel Dandim Kab. Mamasa, Polman & Majene.

**3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan.**

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Tingkat Pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	SMA	6	
2.	SARJANA MUDA	4	
3.	STRATA 1 (S.1)	20	
4.	STRATA 2 (S.2)	8	
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Tingkat Golongan :

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	IV	5	
2.	III	27	
3.	II	6	
4.	I	0	
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Eselon & Struktur Organisasi :

a.	Eselon II	=	1 Orang
b.	Eselon III	=	3 Orang
c.	Eselon IV	=	8 Orang
d.	Staf	=	26 Orang
<b>Jumlah</b>		=	<b>38 Orang</b>

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenjang Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Struktural :

No.	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Diklatpim Tk.I	0	
2.	Diklatpim Tk.II	1	
3.	Diklatpim Tk.III	6	
4.	Diklatpim Tk.IV	5	
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	

- Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenis Kelamin :

1. Laki-Laki	: 26Orang
2. Perempuan	: 12 Orang

Jumlah : 38

#### 4. Sumber dan Jumlah Anggaran.

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat mendapat alokasi anggaran dari dana APBD Provinsi Sulawesi Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp.4.802.000.000,-** telah perubahan sebesar **Rp.4.868.480.360,-** yang terealisasi sebesar **Rp.4.649.968.603,-** atau **95,51%**.

#### 5. Penanggulangan dan Kendalanya.

- Dibentuknya koordinasi Forum Dialog Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).
- Terbentuknya rapat koordinasi gangguan keamanan dalam negeri (Sosialisasi Sistem Pencegahan Dini Implementasi Inpres No. 2 tahun 2013 Junto Inpres No 1 Tahun tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
- Terbentuknya rapat koordinasi dan evaluasi Pencegahan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2019.

#### 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.

- Adanya kesepakatan dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Polman dan Majene terkait penyusunan rencana aksi terpadu TA.2019.
- Menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta instansi dan unsur terkait lainnya beserta jajarannya dalam upaya terciptanya kondisi dan situasi yang kondusif aman dan damai.
- Terwujudnya ketertiban dan kemandirian dengan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak dengan menjangkau, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi

konflik, gejala atau dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini

- Terbangunnya deteksi dini dan mengatasi potensi bencana baik bencana alam, serta meningkatkan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa dan mencegah timbulnya konflik sosial dan sebagainya.

Mamuju, 27 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Sulawesi Barat

**Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) merupakan wujud dari tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 Pasal 18 Ayat (1) dalam pasal tersebut tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yang berisi uraian tentang keterangan pertanggungjawaban program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat. Dari target yang ditentukan dan indikator kinerja yang ada, sebagian besar kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat telah mencerminkan kinerja yang berorientasi pada outcome, yaitu bagaimana hasil suatu kegiatan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan seluruh program kegiatan.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik.
3. Perlunya kelengkapan data terkait tentang (Parpol, IDI, Ormas dan Peta Rawan

Konflik).

4. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah pemprov. Dan pemerintah kabupaten terkait pelaksanaan program kegiatan.
5. Terbatasnya anggaran yang diberikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019, untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sekretaris dan kepala bidang yang ada pada lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat secara lebih intensif untuk melakukan seleksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) / Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya masing-masing agar lebih berkualitas.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim TAPD terkait pemberian anggaran agar dapat memfasilitasi sarana dan prasarana yang jauh lebih baik ke depan.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se- Sulawesi Barat di 6 Kabupaten (Mamuju, Mateng, Pasangkayu, Majene, Polman dan Mamasa) di tingkat daerah ; Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta beberapa instansi terkait tentang data-data tersebut.
4. Memberikan peningkatan, pengetahuan dan Bimbingan Teknis Intelijen bagi petugas intel kantor.
5. Membentuk tim-tim teknis terkait beberapa kegiatan untuk Penanganan Rawan Konflik, IDI, Verifikasi Parpol, FKDM, FKUB, FPK, Ormas, Pemantauan Orang Asing dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba).

Dengan tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (LKPJ-BKBP Prov. Sulbar TA.2019) ini kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk menjadi bahan perbaikan kinerja keterangan pertanggungjawaban pada waktu mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 27 Februari 2020

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Sulawesi Barat

**Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19640408 198603 1 023









